



- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  4. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor I Tahun 2021 tentang Konsultasi pengendalian Kecurangan
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian Risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, serta pelaporannya,
- (3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
- (4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya
- (5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
- (6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;
- (7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
- (8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

(9) Kecurangan

- (9) Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
- (10) Risiko operasional adalah risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional suatu organisasi/entitas
- (11) Risiko Kecurangan merupakan risiko yang dimiliki oleh setiap organisasi/entitas yang timbul karena adanya perilaku kecurangan yang dilakukan oknum tertentu sehingga mengakibatkan kerugian yang bersifat materi maupun non materi (reputasi)
- (12) Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
- (13) Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
- (14) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KEDUA : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat kegiatan, termasuk didalamnya penilaian risiko kecurangan serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal

- (1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- (2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

KETIGA : Penerapan penilaian risiko mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu dilakukan dengan proses yang meliputi:

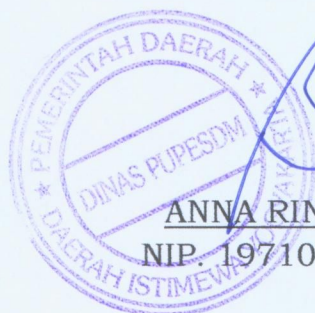
- (1) Penetapan konteks/tujuan,
- (2) Identifikasi risiko;
- (3) Analisis Risiko; dan
- (4) Pelaporan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Format tentang Penilaian Risiko berdasarkan indikator kinerja utama, tingkat kegiatan dan Penilaian Risiko Kecurangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



ANNA RINA HERBRANTI  
NIP. 197106241998032002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI

SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 600.1/6391  
 TANGGAL : 16 Februari 2024  
 TENTANG : Penilaian Risiko

KRITERIA PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL  
 (Berdasarkan indikator kinerja utama, tingkat kegiatan)

SKALA DAMPAK RISIKO

Skor	Skala	Keterangan
5	Katastoprik	Sebagian besar tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
4	Besar	Sebagian tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
3	Sedang	Menggangu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan secara signifikan.
2	Kecil	Menggangu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan meskipun tidak signifikan.
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran subkegiatan secara umum.

SKALA KEMUNGKINAN

Skor	Skala	Keterangan
5	Hampir Pasti Terjadi	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali
4	Sangat Sering Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
3	Sering Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
2	Kadang Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
1	Jarang Terjadi	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali

SKALA RISI

PROBABILITAS	5	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	4	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	3	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
	2	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
	1	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

Penanganan.....

**PENANGANAN RISIKO  
(RENCANA TINDAK PENGENDALIAN)  
FORMAT REGISTER RISIKO**

Tingkat Risiko	Skala Risiko	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN
13 s.d. 25	SANGAT TINGGI	HINDARI RISIKONYA	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.
9 s.d. 12	TINGGI	PINDAHKAN RISIKONYA	Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.
5 s.d.8	SEDANG	KURANGI RISIKONYA (MITIGASI)	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdayanya.
1 s.d.4	RENDAH	TERIMA	Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring.

(Berdasarkan indikator kinerja utama, tingkat kegiatan)

Nama OPD		• INSPEKTORAT D.I. YOGYAKARTA															
Tujuan		.....															
Sasaran Strategis		.....															
Indikator Kinerja Utama		.....															
No	Na Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan	Sasar Sub. Kegiatan	Tujua kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	VC	uraia Dampak	penge ndalia Yang Ada	Status Resiko				Ronca Tindak Penge ndalian	pemilik Risiko/ penang gjawab	Tar get
						Pemy ataan Risiko							Skor	Kate gori/ Perin gkat Risiko			
						(7)	(8)		(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

....

Kriteria.....

KRITERIA PENILAIAN RISIKO KECURANGAN  
SKALA DAMPAK RISIKO KECURANGAN

Level	Skala Dampak	Kriteria Dampak		
		Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
5	<b>Sangat Signifikan</b>	Lebih dari 28 hari kalender	Dilakukan oleh Penanggung Jawab/PJ	>50%
4	<b>Signifikan</b>	Lebih dari 22 hari kalender s.d 27 hari	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah PJ	31% sd 50%
3	<b>Sedang</b>	Lebih dari 15 hari kalender s.d 21 hari	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah PJ	21% sd 30%
2	<b>Kurang Signifikan</b>	Lebih dari 8 hari kalender s.d 14 hari	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah PJ	10% sd 20%
1	<b>Tidak Signifikan</b>	Sampai dengan 7 hari kalender	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah PJ	<10%

SKALA KEMUNGKINAN KECURANGAN

Skor	Skala	Kriteria Kemungkinan	
		% Kemungkinan Terjadi Dalam 1 Kejadian	Frekuensi Kemungkinan Terjadi
5	<b>Sangat Sering</b>	>41% kejadian risiko	Terjadi $\geq$ 2 kali dalam sebulan
4	<b>Sering</b>	31 sd 40% kejadian risiko	Terjadi 12 kali dalam setahun
3	<b>Sedang</b>	21 sd 30% kejadian risiko	Terjadi 3 kali dalam setahun
2	<b>Jarang</b>	11 sd 20% kejadian risiko	Terjadi 2 kali dalam setahun
1	<b>Jarang Sekali</b>	<10% kejadian risiko	Terjadi 1 kali dalam setahun

Skala.....

SKALA RISIKO KECURANGAN (1)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Sering	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Kadang-kadang	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Jarang	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
1	Sangat Jarang	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI

SKALA RISIKO KECURANGAN (2)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5





# PENILAIAN RISIKO



## PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

			<b>2024</b>

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Bumijo No. 5, Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320

Website: [dpupesdm.jogjaprov.go.id](http://dpupesdm.jogjaprov.go.id) email: [dpupesdm@jogjaprov.go.id](mailto:dpupesdm@jogjaprov.go.id)

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	
KATA PENGANTAR .....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	3
1.4 Ruang Lingkup .....	3
1.5 Metodologi .....	3
BAB II PROFIL DINAS PUPESDM DIY .....	5
2.1 Struktur Organisasi.....	5
2.2 Tugas dan Fungsi .....	6
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	7
2.4 Kegiatan Utama (Core Business).....	9
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO .....	13
3.1. Penilaian Risiko Berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	13
3.1.1. Kriteria Penilaian Risiko Kegiatan.....	13
3.1.2. Identifikasi Risiko Kegiatan.....	14
3.1.3. Analisis Risiko Kegiatan.....	15
3.2. Penilaian Risiko Kecurangan .....	26
3.2.1. Kriteria Penilaian Risiko Kecurangan.....	26
3.2.2. Identifikasi Risiko Kecurangan.....	27
3.2.3. Analisis Risiko Kecurangan .....	28
BAB IV KESIMPULAN.....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

## KATA PENGANTAR


Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unsurnya. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya risk register di tingkat entitas dan kegiatan.


Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menyelenggarakan SPIP. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib dalam penyelenggaraan SPIP.

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas, tingkat kegiatan dan tahapan kegiatan, dalam rangka penyempurnaan pengendalian yang masih lemah dan mengurangi dampak atas risiko.

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi  
Sumber Daya Mineral DIY

  
ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.  
NIP. 19710624 199803 2 002



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13 ayat I mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.

Adapun Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut beberapa pakar antara lain: Nurmalia Hasanah, dkk (2016:131) mengatakan bahwa: "Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundangundangan." Sedangkan Menurut Indra Bastian (2010:129), Sistem Pengendalian Intern adalah: "Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan menejemen."

Lebih lanjut pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Mahmudi (2010:20) "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

Dari pengertian tersebut diatas tentunya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kedepan bisa menciptakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal ,efektif dan efisien.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dalam penyusunannya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007or 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah,
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta,
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan Penilaian Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat sub-kegiatan termasuk aspek/tahapan kegiatan pada masing-masing subbagian;
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan/sasaran subkegiatan termasuk aspek/tahapan kegiatan pada masing-masing subbagian.

#### **1.3.2. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian tahun-tahun berikutnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penilaian Risiko pada Tujuan, Sasaran dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi seluruh Bidang dan Balai yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:

1. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
2. Bidang Bina Marga;
3. Bidang Cipta Karya;
4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Bidang Perumahan;
6. Balai Jasa Konstruksi;
7. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
8. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul;
9. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo

Pada penilaian Risiko Kecurangan meliputi keseluruhan aspek / tahapan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral baik di Bidang dan Balai.

### **1.5. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta baik pada tahap identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming dan Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh bidang beserta subbagian-subbagiannya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

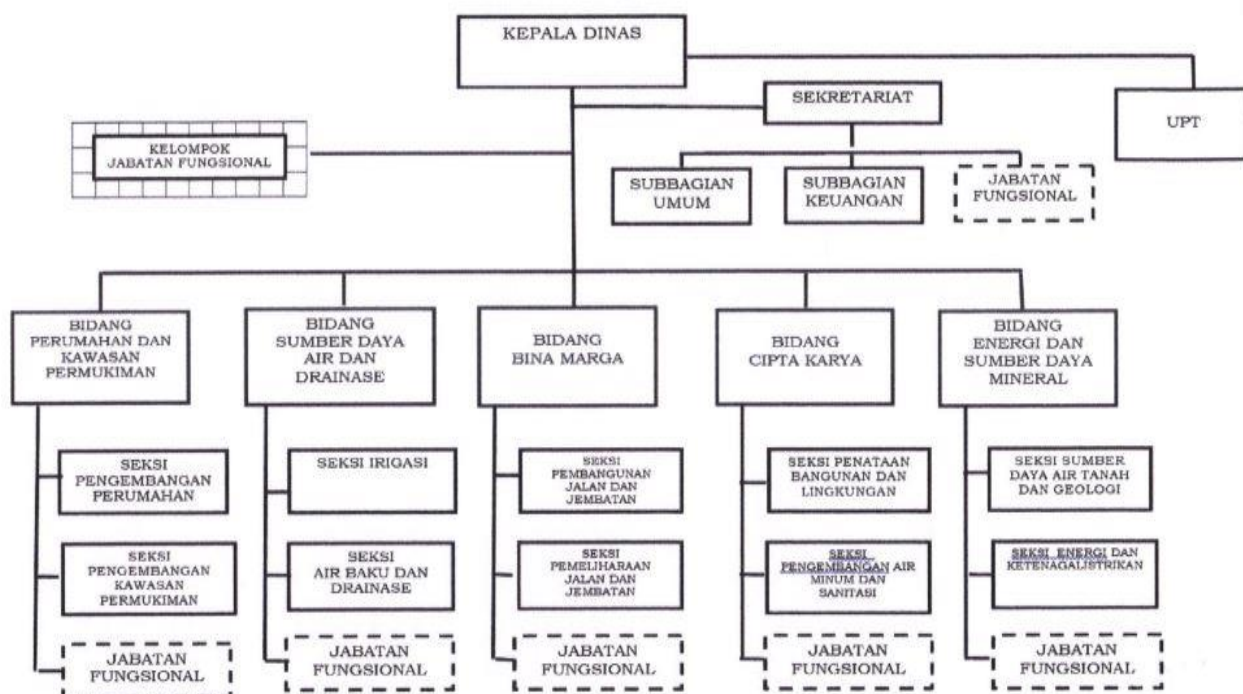
## BAB II PROFIL DINAS PUPESDM DIY

### 2.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum; dan
  2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas: 1. Seksi Pengembangan Perumahan; dan 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
  1. Seksi Kigasi; dan
  2. Seksi Air Baku dan Drainase.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri atas: 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.
- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
  1. Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi; dan
  2. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- h. Unit pelaksana teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Bagas dibawah ini:





## 2.2 Tugas dan Fungsi

Bedasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- c. Penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- d. Pengembangan dan pengelolaan urusan pekedaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- e. Pengawasan dan pengendalian urusan pekerj'aaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. Fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan rt.ang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan urusan di bidang peke{aan umum dan perumahan serta kawasan permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- h. Pemberdayaan sumber daya dan mitra keq'a urusan di bidang peke4'aan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- i. Pelaksanaan pelayanan umum urusan pekeg'aan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- j. Fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang seta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- k. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi dinas;
- n. Fasilitasi penyusunurn kebijakan proses bisnis dinas;
- o. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup dinas;
- p. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekedaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
- q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan

- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas dinas.

### 2.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai *cascade* kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra 2022-2027, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah : penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi, penyediaan infrastruktur sumber daya air, peningkatan aksesibilitas jalan, peningkatan kinerja jasa konstruksi, rumah tangga yang menempati hunian layak, rumah tangga berakses listrik, meningkatnya kesesuaian perusahaan pertambangan terhadap pola ruang, terlaksananya upaya konservasi sumber daya air tanah melalui pengendalian rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman, meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY selama lima tahun adalah:

#### A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM.
2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi.
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY.
4. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.

#### B. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.

#### C. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan cakupan pelayanan energi.
2. Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
				Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77 %	95,47%	95,90%	96,32%	96,52%	96,72%	96,72%
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96.42%	96.77%	97.09%	97.41%	97.73%	98.05%	98.05%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
				Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64.06%	82.03%	85.94%	90.63%	95.31%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97.70%	98.27%	98.66%	98.77%	98.99%	100%	100%
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	N/A	81,65%	86,07%	90,72%	95,36%	100%	100%
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95.51%	95.67%	95.83%	95.98%	96.14%	96.30%	96.30%
7	Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
8	Meningkatnya kesesuaian pengusaha pertambangan terhadap pola ruang	Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9.14%	9.18%	9.23%	9.28%	9.33%	9.38%	9.38%
9	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
10	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

## 2.4 Kegiatan Utama (Core Business)

Kegiatan utama menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY merupakan implementasi dari 20 program utama yang dikelola oleh sekretariat, bidang dan balai. Kegiatan utama selanjutnya dijabarkan dalam sub kegiatan yaitu:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di daerah Irigasi	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Rehabilitasi Jalan		
Rekonstruksi Jalan		
Pemeliharaan Rutin Jalan		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
		Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	<p>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>	<p>Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>
		<p>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>
	<p>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</p>	<p>Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</p>
	<p>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>	<p>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>
<p>Program Pengelolaan Energi Terbarukan</p>	<p>Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</p>
<p>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</p>	<p>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</p>
		<p>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</p>
	<p>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</p>	<p>Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</p>
<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>
		<p>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p>
		<p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>
		<p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p>
		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p>
		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p>

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>Balai Pengelolaan Air Limbah Dan Pengembangan Jasa</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Konstruksi Kualifikasi Ahli	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	



### BAB III HASIL PENILAIAN RESIKO

#### 3.1. Penilaian Risiko Berdasar Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### 3.1.1. Kriteria Penilaian Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Skor	Skala	Keterangan
5	<b>Katastropik</b>	Sebagian besar tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
4	<b>Besar</b>	Sebagian tujuan/sasaran sub-kegiatan gagal dicapai.
3	<b>Sedang</b>	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan secara signifikan.
2	<b>Kecil</b>	Mengganggu pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan meskipun tidak signifikan.
1	<b>Tidak Signifikan</b>	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran sub-kegiatan secara umum.

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut :

Skor	Skala	Keterangan
5	<b>Hampir Pasti Terjadi</b>	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali
4	<b>Sangat Sering Terjadi</b>	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
3	<b>Sering Terjadi</b>	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
2	<b>Kadang Terjadi</b>	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
1	<b>Jarang Terjadi</b>	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali

3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut :

PROBABILITAS	5	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	4	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
	3	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
	2	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
	1	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

3.1.2. Identifikasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 memiliki 32 risiko atas Kegiatan Utama (Core-Business) yang keseluruhan dikelola oleh Bidang dan Balai, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	2024		
		Sebab	Risiko	Dampak
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi			
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
7	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
8	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
9	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
11	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
12	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
13	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
14	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
15	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
16	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			

17	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
18	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
19	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut			
20	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
21	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			
22	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			
23	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
24	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
25	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
26	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
27	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
28	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
29	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
30	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			
31	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			

### 3.1.3. Analisa Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Analisa risiko dilakukan Tim Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisa risiko adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	9
5 s.d. 8	Sedang	8
1 s.d. 4	Rendah	5
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		22

2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	31
5 s.d. 8	Sedang	4
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		35

3. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	3
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

5. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	14
5 s.d. 8	Sedang	35
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		49

6. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	6
5 s.d. 8	Sedang	29
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		36

7. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	6
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		7

8. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	2
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		6

9. Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

11. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		5

12. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	3
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

13. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

14. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	5
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		7

15. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	2
9 s.d. 12	Tinggi	3
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		8

16. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	SangatTinggsi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	4



1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		6

17. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

18. Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

19. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0

5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

20. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

21. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

22. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0

5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	3
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

23. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	15
5 s.d. 8	Sedang	3
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		21

24. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	3
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

25. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	2
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

26. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

27. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

28. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	0

1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

29. Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

30. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
5 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

31. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Hasil Analisa risiko pada Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
13 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
5 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d. 4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

### 3.2. Penilaian Risiko Kecurangan

#### 3.2.1. Kriteria Penilaian Risiko Kecurangan

##### 1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko kecurangan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Level	Skala Dampak	Kriteria Dampak		
		Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara Daerah
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 28 hari kalender	Dilakukan Oleh Penanggung Jawab PJ	>50%
4	Signifikan	Lebih dari 22 hari kalender s.d 27 hari	Dilakukan Oleh pejabat satu tingkat dibawah Pj	31% sd 50%
3	Sedang	Lebih dari 15 hari kalender s.d 21 hari	Dilakukan Oleh pejabat dua tingkat dibawah PJ	21% sdv30%
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 8 hari kalender s.d 14 hari	Dilakukan Oleh pejabat tiga tingkat dibawah PJ	10% sd 20%
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 7 hari kalender	Dilakukan Oleh pejabat empat tingkat dibawah PJ	< 10 <sup>0</sup> /0

##### 2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skor	Skala	Kriteria Kemungkinan	
		% Kemungkinan Terjadi Dalam 1 Kejadian	Frekuensi Kemungkinan Terjadi
5	Sangat Sering	>41% kejadian risiko	Terjadi >=2 kali dalam sebulan
4	Sering	31 sd 40% kejadian risiko	Terjadi 12 kali dalam setahun
3	Sedang	21 sd 30% kejadian risiko	Terjadi 3 kali dalam setahun
2	Jarang	11 sd 20% kejadian risiko	Terjadi 2 kali dalam setahun
1	Jarang Sekali	< 10% kejadian risiko	Terjadi 1 kali dalam setahun

##### 3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Sering	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Kadang-kadang	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Jarang	RENDAH	RENDAH	SEDANG	SEDANG	TINGGI
1	Sangat Jarang	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi / Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Tidak Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

3.2.2. Identifikasi Risiko Kecurangan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 telah memetakan adanya 20 Risiko Kecurangan dalam 8 (enam) Aspek/Tahapan Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aspek/Tahapan Kegiatan	2024		
		Sebab	Risiko	Dampak
1.	Urusan PUPKP & ESDM	9	5	12
2.	Transaksi Pendapatan	1	1	1
3.	Transaksi Pengeluaran	3	3	3
4.	Pengadaan Baran dan Jasa	6	4	4
5.	Sumber Daya Manusia SDM	2	1	1
6.	Aset dan Persediaan	4	3	6
7.	Teknologi Informasi	1	1	3
8.	Sistem Komunikasi dan Pelaporan	4	2	4

### 3.2.3. Analisa Risiko Kecurangan

Analisa risiko dilakukan Tim Manajemen Risiko dengan mengadakan Forum Group Discussion bersama dengan seluruh perancang kepentingan yang terlibat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil analisa risiko kecurangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

#### 1. Aspek / Tahapan Kegiatan Pengawasan

Hasil Analisa risiko pada Aspek /Tahapan Kegiatan Urusan PUPKP & ESDM pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
4 s.d. 8	Sedang	3
1 s.d.4	Rendah	0
<b>JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA</b>		<b>5</b>

#### 2. Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pendapatan

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d.4	Rendah	1
<b>JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA</b>		<b>1</b>

#### 3. Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pengeluaran

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Transaksi Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d.4	Rendah	3
<b>JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA</b>		<b>3</b>



4. Aspek / Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	2
4 s.d. 8	Sedang	2
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		4

5. Aspek / Tahapan Kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0
4 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

6. Aspek / Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	1
9 s.d. 12	Tinggi	1
4 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		3

7. Aspek / Tahapan Kegiatan Teknologi Informasi

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Teknologi Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut:

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	0

4 s.d. 8	Sedang	1
1 s.d.4	Rendah	0
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		1

8. Aspek / Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan

Hasil Analisa risiko pada Aspek / Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam tabel berikut.

Skor Risiko	Uraian	Jumlah
15 s.d. 25	Sangat Tinggi	0
9 s.d. 12	Tinggi	1
4 s.d. 8	Sedang	0
1 s.d.4	Rendah	1
JUMLAH RISIKO YANG DIKELOLA		2

## **BAB IV KESIMPULAN**

Dari hasil penilaian risiko berdasar pada Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah

Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan.

A. Risiko dengan kategori "Sangat Tinggi" berjumlah 10 risiko dengan rincian:

1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 82 risiko
2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ada 1 risiko
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 risiko
4. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman ada 2 risiko
5. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 risiko
6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 1 risiko
7. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada 1 risiko
8. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ada 1 risiko

B. Risiko dengan kategori "Tinggi" berjumlah 144 risiko dengan rincian:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 9 risiko
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 31 risiko
3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional ada 1 risiko
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi ada 2 risiko
5. Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada 14 risiko
6. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ada 6 risiko
7. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya ada 6 risiko
8. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 2 risiko
9. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ada 1 risiko
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ada 2 risiko
11. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ada 2 risiko
12. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ada 3 risiko
13. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ada 1 risiko
14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ada 5 risiko
15. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman ada 3 risiko
16. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ada 2 risiko
17. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat ada 2 risiko

18. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ada 2 risiko
19. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ada 2 risiko
20. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 15 risiko
21. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ada 2 risiko
22. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan ada 1 risiko
23. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ada 1 risiko

C. Risiko dengan kategori "Sedang" berjumlah 94 risiko dengan rincian:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 8 risiko
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 4 risiko
3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional ada 3 risiko
4. Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada 35 risiko
5. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ada 29 risiko
6. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya ada 1 risiko
7. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman ada 2 risiko
8. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ada 4 risiko
9. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut ada 2 risiko
10. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ada 2 risiko
11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 3 risiko
12. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ada 1 risiko

D. Risiko dengan kategori "Rendah" berjumlah 24 risiko dengan rincian:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 5 risiko
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi ada 1 risiko
3. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ada 1 risiko
4. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan ada 2 risiko
5. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ada 2 risiko
6. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ada 1 risiko
7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ada 1 risiko
8. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman ada 1 risiko
9. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ada 3 risiko

10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ada 2 risiko
11. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ada 3 risiko
12. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi ada 2 risiko

Dari hasil penilaian risiko kecurangan pada 8 Aspek/Tahapan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah

Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan:

1. Risiko dengan kategori "Sangat Tinggi" berjumlah 1 risiko dengan rincian:
  - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan ada I RISIKO
2. Risiko dengan kategori "Tinggi" berjumlah 6 risiko dengan rincian:
  - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Urusan PUPKP & ESDM ada 2 RISIKO
  - b. Aspek/Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ada 2 RISIKO
  - c. Aspek/Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan ada I RISIKO
  - d. Aspek/Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan ada I RISIKO
3. Risiko dengan kategori "Sedang" berjumlah 8 risiko dengan rincian:
  - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Urusan PUPKP & ESDM ada 3 RISIKO
  - b. Aspek/Tahapan Kegiatan Pengadaan Baran dan Jasa ada 2 RISIKO
  - c. Aspek/Tahapan Kegiatan Sumber Daya Manusia SDM ada 1 RISIKO
  - d. Aspek/Tahapan Kegiatan Aset dan Persediaan ada 1 RISIKO
  - e. Aspek/Tahapan Kegiatan Teknologi Informasi ada I RISIKO
4. Risiko dengan kategori "Rendah" berjumlah 4 risiko dengan rincian:
  - a. Aspek/Tahapan Kegiatan Transaksi Pendapatan ada 1 RISIKO
  - b. Aspek/Tahapan Kegiatan Transaksi Pengeluaran ada 3 RISIKO
  - c. Aspek/Tahapan Kegiatan Sistem Komunikasi dan Pelaporan ada 1 RISIKO

## LAMPIRAN

1. MATRIKS REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY TAHUN 2024 (*COREBUSINESS*)
2. PENILAIAN KECURANGAN/ *FRAUD ASSESMENT* (FRA) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL DIY TAHUN 2024
3. MATRIKS RISIKO FINAL SPBE DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY TAHUN 2024

**NAMA OPD** : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY  
**TUJUAN** : Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral  
**SASARAN STRATEGIS** : 1. Penduduk Berakses Air Minum  
 2. Penduduk Berakses Sanitasi  
 3. Penyediaan infrastruktur sumber daya air  
 4. Peningkatan aksesibilitas Jalan  
 5. Peningkatan kinerja jasa konstruksi  
 6. Rumah Tangga yang menempati hunian layak  
 7. Rumah Tangga Berakses Listrik  
 8. Meningkatnya kesesuaian pengusaha pertambangan terhadap pola ruang  
 9. Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman  
 10. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA** : 1. Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak  
 2. Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak  
 3. Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air  
 4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan  
 5. Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi  
 6. Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni  
 7. Persentase rumah tangga berakses listrik  
 8. Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang  
 9. Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah  
 10. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No.	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
				No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>																
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1 Jumlah Sumur Air Tanah Air Baku yang Dibangun = 1 titik	1	Terjadinya kecelakaan kerja	Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	3	2	6	Sedang	monitoring penerapan SMKK pada lokasi pelaksanaan pekerjaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				2	Tidak ditemukannya air sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang ditentukan dalam kontrak	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi (struktur geologi lingkungan setempat)	UC	Konstruksi dianggap gagal dan tidak dapat dibayarkan	Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada hasil kajian dokumen SED Geologi Lingkungan Air Tanah	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan agar pelaksanaan sesuai dengan hasil kajian SED; b. Koordinasi dengan Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi ESDM	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Berpotensi menyebabkan kerusakan fungsi dan umur bangunan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh pengawas lapangan b. Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				4	Terjadinya	Kurangnya	C	a. Terjadinya konflik internal	a. Koordinasi awal dengan	3	2	6	Sedang	a. Konfirmasi legalitas	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
				5	Perubahan rencana lokasi usulan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6		a. Dilakukan identifikasi awal terkait lokasi rencana sumur bor sebelum kegiatan dimulai; c. melakukan verifikasi data usulan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	1 bulan

2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun : 4 dokumen	1	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan	Kurangnya pemahaman penyedia terhadap Kerangka Acuan Kerja pekerjaan	C	Berpotensi menyebabkan kesalahan desain dan kesalahan konstruksi	Monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Supervisi Perencanaan	2	4	8	Sedang	Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Supervisi Perencanaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				2	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Instansi, penyedia jasa, perangkat daerah dan warga calon penerima manfaat air bersih	C	a. Terjadinya konflik internal antara warga calon penerima manfaat dan calon penerima hibah, terutama terkait status kepemilikan tanah oeh warga; b. Rencana Konstruksi Sumur bor tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	a. Koordinasi awal dengan warga calon penerima manfaat dan calon penerima hibah; b. Identifikasi status kepemilikan tanah dengan dukuh	3	2	6	Sedang	a. Konfirmasi legalitas tanah dengan bukti surat kerelaaan tanah untuk dihibahkan dari pemilik tanah; b. Mengoptimalkan kegiatan/forum sosialisasi pekerjaan;	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
				3	Perubahan lokasi penyelidikan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6		melakukan verifikasi data lokasi penyelidikan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara = 25 unit	1	Belum semua embung terpelihara (babat semak)	Ketidacermatan dalam melaksanakan survey lapangan	C	kerusakan pada pasangan batu disebabkan karena pelapukan akibat ditumbuhi tanaman	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				2	Masih terjadi sedimentasi di embung	Dana yang terbatas	C	Debit air berkurang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				3	embung yang dibersihkan ditumbuhi rumput lagi dan terdapat sedimen lagi	Pemeliharaan berkala dilakukan dengan jarak waktu lama	C	Pendangkalan embung dan banyak semak	Dilakukan prioritas pelaksanaan pemeliharaan	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				4	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	- Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta money yang ketat - dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penerbitan Jaminan pelaksanaan terikat oleh regulasi Bnak penjamin	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Dilakukan teguran secara lisan maupun tertulis	2	3	6	Sedang	a. Dilakukan teguran secara lisan maupun tertulis, b. dilakukan koordinasi secara instens	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				6	Pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal	Butuh waktu dan kecermatan dalam mencocokkan volume lapangan dengan volume kontrak awal	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum kontrak	3	3	9	Sedang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum (bila perlu) (perlu ditambah 1 RTP selain yg sudah ada) Pengukuran bersama dilakukan maksimal 1 minggu setelah tanda tangan kontrak	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan



				7	masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan		
	2	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi = 2 dokumen	1	Data SDA tidak konsisten	Perbedaan persepsi dalam menentukan tingkat kerusakan bangunan	C	Terjadi kesalahan dalam input data	Melaksanakan diskusi dengan masing-masing korwil dan tenaga ahli untuk koreksi data	3	3	9	Sedang	Penentuan standar data yang dibutuhkan untuk setiap parameter pengukuran	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
					2	Belum semua alat di pos hidrologi terpelihara	Pemeliharaan berkala dengan jangka waktu lama	C	Kurangnya akurasi data yang dihasilkan	Cek lapangan	3	3	9	sedang	Peningkatan pemeliharaan berkala	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1	Sarana dan Prasarana Rapat / Pertemuan tidak memadai	Sarana dan prasarana yang tidak mendukung	C	Mengganggu proses berjalannya rapat / pertemuan	Memastikan sarana dan prasarana tersedia memadai	1	1	1	Rendah	Melakukan pengecekan sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan kegiatan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
					2	Kebutuhan Narasumber tidak sesuai dengan substansi kegiatan	Background Narasumber tidak memenuhi kebutuhan kegiatan	C	Penyampaian materi Rapat kurang maksimal	Koordinasi dengan Narasumber sebelum pelaksanaan	1	1	1	Rendah	Melaksanakan diskusi dengan Narasumber untuk menyamakan pemahaman berkaitan tema Acara	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
					3	Tingkat kehadiran peserta rendah	Pelaksanaan pertemuan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat	C	Penyusunan hasil rekomendasi kurang maksimal	Penyampaian rencana rapat jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan	1	1	1	Rendah	Melakukan koordinasi dengan ketua kelompok dan tokoh masyarakat untuk penentuan jadwal pertemuan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
	4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1	Alokasi pemberian rekomtek terganggu	Kurang tersedianya informasi dan data yang lengkap	C	Tertundanya pemberian pemberian rekomtek	Pemberikan persyaratan pengajuan rekomtek	1	1	1	Rendah	Sosialisasi Kebijakan / SOP	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
					2	Pemohon tidak tahu SOP dan Prosedur permohonan Rekomtek	Pelaksanaan SOP yang tidak sesuai oleh Pemohon	C	Pemohon tidak melaksanakan proses yang telah ditentukan	publikasi tahapan proses permohonan rekomtek	1	1	1	Rendah	Monitoring Kebijakan / SOP	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
						2	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	6 bulan
						3	Potensi kecelakaan kerja;	- Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.

				4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat.	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising;	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan;	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada jalan dan lokasi kerja;	4	3	12	Tinggi	a. Pertemuan berkala dengan masyarakat/menggunakan teleconference maupun langsung; b. Pendekatan sosial masyarakat	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				5	Terkena racun binatang	Adanya binatang yang berbahaya (berbisa/beracun) muncul saat pembersihan lahan untuk persiapan pekerjaan	C	Terjadi luka ringan s.d. Serius	Memberi bekal yang memadai pada pekerja dan mempersiapkan P3K	4	3	12	Tinggi	Memberi bekal yang memadai pada pekerja dan mempersiapkan P3K	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				6	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta money yang ketat, b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				7	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penerbitan Jaminan pelaksanaan terikat oleh regulasi Bnak penjamin	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	3	9	Sedang	Pengecekan antara penyedia jasa konsultan dan kontraktor	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				8	Pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal	Butuh waktu dan kecermatan dalam mencocokkan volume lapangan dengan volume kontrak awal	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum kontrak	3	3	9	Sedang	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				9	Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas	Kurangnya pengetahuan dan pengalaman (SDM) dalam hal pengawasan lapangan	C	kemungkinan terjadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek dan ukuran	pelatihan kepada pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum (bila perlu)	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				10	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	a. Pelatihan kepada pengawas lapangan b. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan c. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
				2	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	6 bulan
				3	Potensi kecelakaan kerja;	- Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.

4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat.	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising;	C	Kemacetan lalu lintas di permukaan; Peningkatan polusi debu dan kebisingan;	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada jalan dan lokasi kerja;	4	3	12	Tinggi	a. Pertemuan berkala dengan masyarakat/menggunakan teleconference maupun langsung; b. Pendekatan sosial masyarakat	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
5	Terkena racun binatang	Adanya binatang yang berbahaya (berbisa/beracun) muncul saat pembersihan lahan untuk persiapan pekerjaan	C	Terjadi luka ringan s.d. Serius	Memberi bekal yang memadai pada pekerja dan mempersiapkan P3K	4	3	12	Tinggi	Memberi bekal yang memadai pada pekerja dan mempersiapkan P3K	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
6	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta money yang ketat, b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
7	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penerbitan Jaminan pelaksanaan terikat oleh regulasi Bnak penjamin	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	3	9	Sedang	Pengecekan antara penyedia jasa konsultan dan kontraktor	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
8	Pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal	Butuh waktu dan kecermatan dalam mencocokkan volume lapangan dengan volume kontrak awal	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum kontrak	3	3	9	Sedang	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
9	Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas	Kurangnya pengetahuan dan pengalaman (SDM) dalam hal pengawasan lapangan	C	kemungkinan terjadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek dan ukuran	pelatihan kepada pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum (bila perlu)	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
10	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	a. Pelatihan kepada pengawas lapangan b. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan c. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Petugas OP bekerja secara harian	Tugas fungsi petugas		Kurang optimalnya operasi jaringan irigasi	Pembagian jadwal sesuai Hari Orang kerja (HOK) selama maksimal 22 hari per bulan untuk 8 jam perhari	3	3	9	Sedang	Pembuatan jadwal secara shift untuk 24 jam	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				2	Kegiatan survey dilakukan terlalu lama	Adanya kerusakan yang perlu diperbaiki terlalu banyak	C	Terlambatnya proses pengadaan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat akurat dan detail kemudian dituangkan dalam RM dan penambahan personil dan efektifitas serta efisiensi waktu	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta money yang ketat b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	a. Pelatihan kepada pengawas lapangan b. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan c. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Belum semua jaringan irigasi terpelihara (babat semak)	Ketidak cermatan dalam melaksanakan survey lapangan	C	kerusakan pada pasangan batu disebabkan karena pelapukan akibat ditumbuhi tanaman	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				6	Masih terjadi sedimentasi di saluran irigasi	Dana yang terbatas	C	Debit air berkurang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				7	Irigasi yang dibersihkan ditumbuhi rumput lagi dan terdapat sedimen lagi	Pemeliharaan berkala dilakukan dengan jarak waktu lama	C	Pendangkalan saluran irigasi dan jaringan irigasi banyak semak	Dilakukan prioritas pelaksanaan pemeliharaan	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
8	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	1	Petugas OP bekerja secara harian	Tugas fungsi petugas		Kurang optimalnya operasi bendung irigasi	Pembagian jadwal sesuai Hari Orang kerja (HOK) selama maksimal 22 hari per bulan untuk 8 jam perhari	3	3	9	Sedang	Pembuatan jadwal secara shift untuk 24 jam	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
				2	Kegiatan survey dilakukan terlalu lama	Adanya kerusakan yang perlu diperbaiki terlalu banyak	C	Terlambatnya proses pengadaan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat akurat dan detail kemudian dituangkan dalam RM dan penambahan personil dan efektifitas serta efisiensi waktu	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta money yang ketat b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	a. Pelatihan kepada pengawas lapangan b. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan c. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan	
				5	Belum semua bendung terpelihara (babat semak)	Ketidak cermatan dalam melaksanakan survey lapangan	C	kerusakan pada pasangan batu disebabkan karena pelapukan akibat ditumbuhi tanaman	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
				6	Masih terjadi sedimentasi di bendung	Dana yang terbatas	C	Debit air berkurang	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara tepat, tepat, akurat dan detail	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
				7	bendung yang dibersihkan ditumbuhi rumput lagi dan terdapat sedimen lagi	Pemeliharaan berkala dilakukan dengan jarak waktu lama	C	Pendangkalan bendung dan banyak semak	Dilakukan prioritas pelaksanaan pemeliharaan	3	3	9	Sedang	Pelatihan kepada juru dan pengamat lapangan	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember	
	9	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1	kegiatan tata pengaturan air mundur	Mundurinya rapat koordinasi	C	Jadwal tata tanam mundur	Koordinasi secara berkala	3	3	9	Sedang	melibatkan P3A/GP3A dalam proses penyusunan rekomendasi	PPTK Bidang SDAD	12 bulan

**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	Pembangunan TPA/TPST/SPA	1	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
						2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine)	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	manajerial yang optimal	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
						3	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
						4	tidak dapat menyelesaikan proses sertifikat tanah karena terlambat	kurangnya koordinasi dengan tokoh desa dan kantor pertanahan	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Melakukan komunikasi dengan tokoh desa dan kantor Pertanahan	3	2	6	Sedang	Melakukan pendekatan kepada tokoh desa dan kantor pertanahan dan memastikan timeline pekerjaan sesuai	PPTK Bidang Cipta Karya	12 bulan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Potensi penurunan kesehatan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan.	Bertemu dengan banyak orang di lokasi pelaksanaan yang berada di tepi jalan raya (mobilitas pengguna jalan), atau penggunaan peralatan secara bersama-sama.	UC	Kemungkinan penularan penyakit melalui kontak maupun udara.	1. Pengadaan peralatan kesehatan kerja; 2. Pemakaian alat pelindung kesehatan pada setiap pekerja; 3. Pelaksanaan protokol kesehatan 3 M.	2	2	4	Rendah	1. Melaksanakan pemantauan pengenaan alat pelindung Diri; 2. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan kontak langsung selama tahap pelaksanaan.	PPTK Bidang SDAD	Selama 12 Bulan Januari s/d Desember
						2	Peralatan yang digunakan mengalami kerusakan/tidak dapat digunakan.	Tidak dilakukan pemeriksaan peralatan pekerjaan pemeliharaan.	C	1. Pekerjaan gali waled terhenti; 2. Aliran dalam saluran drainase tidak lancar; 3. Genangan masih dapat terjadi.	1. Melaksanakan pemeriksaan awal pada peralatan yang akan digunakan; 2. Menggunakan peralatan sesuai penggunaannya.	3	3	9	Sedang	1. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara berkala; 2. Menyiapkan cadangan peralatan.	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						3	Kecelakaan kerja pada penggunaan peralatan.	1. Tidak dilakukan standar penggunaan peralatan dengan benar; 2. Tidak mengenakan alat pelindung diri.	C	1. Pekerja mengalami kecelakaan kerja; 2. Pekerjaan terhenti dan terlambat.	1. Pengadaan peralatan keselamatan kerja; 2. Pemakaian alat keselamatan kerja pada setiap pekerja; 3. Pelaksanaan prosedur penggunaan peralatan dengan benar.	3	3	9	Sedang	1. Melaksanakan pemantauan pengenaan alat keselamatan kerja; 2. Melaksanakan pemantauan prosedur penggunaan peralatan dengan benar selama tahap pelaksanaan; 3. Menyiapkan alat dan bahan P3K di lokasi kerja. Penerapan Prosedur K3	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																		
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1	Rehabilitasi Jalan	1	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 1,5 Km (Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan - Tempel)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelompok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

2	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 1,5 Km (Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo - Kebonagung 1)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua <b>Kelompok masyarakat</b>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
3	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 1,5 Km (Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua <b>Kelompok masyarakat</b>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

		4	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 1,2 Km (Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua <u>Kelompok masyarakat</u>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang <u>baik</u>	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
		5	Panjang Jalan yang Direhabilitasi = 1,6 Km (Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang)	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua <u>Kelompok masyarakat</u>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang <u>baik</u>	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
2	Rekonstruksi Jalan	1	Panjang jalan yang direkonstruksi = 0,35 Km	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan



				2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua <del>Kelompok masyarakat</del>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang <u>bagus</u>	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
3	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun : 57 Dokumen	1	Output pekerjaan tidak sesuai dengan target	Pihak yang mengusulkan izin rekomendasi tidak dapat dihubungi	C	Tidak memenuhi target yang direncanakan	Memberikan pendampingan dalam hal koordinasi secara intensif	2	3	6	Sedang	Memberikan tenggat waktu dalam menyelesaikan penerbitan izin rekomendasi	PPTK Bidang Bina Marga	12 bulan
				2	Seleksi gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan; b. Perencanaan terkait dengan Kualifikasi teknis <del>dan harga yang realistis</del>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang <u>bagus</u>	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya = 674,58 Km	1	Seleksi gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan; b. Perencanaan terkait dengan Kualifikasi teknis <del>dan harga yang realistis</del>	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

				3	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	1	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin = 674,58 Km	1	Kegiatan survey dilakukan terlalu lama	Adanya kerusakan yang perlu diperbaiki terlalu banyak dan detail	C	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat akurat dan detail kemudian dituangkan dalam RMK dan penambahan personil	3	3	9	Sedang	Membagi pekerjaan pelaksanaan survey kepada Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Perubahan Volume Pekerjaan dalam penyusunan HPS	Terjadi perubahan penetapan pagu HPS	C	Terlambatnya pelaksanaan penyiapan syarat lelang	pembagian tugas dalam menyiapkan penyusunan dokumen lelang	3	3	9	Sedang	Segera melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan volume item pekerjaan	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penertiban Jaminan Pelaksanaan terikat oleh regulasi Bank Penjamin	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	2	6	Sedang	a. Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis, b. dilakukan koordinasi secara intens	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Kegiatan fisik dilaksanakan tidak tepat waktu	Butuh waktu pencocokan volume kebutuhan lapangan dengan volume dalam kontrak awal	C	Mempengaruhi kegiatan fisik di lapangan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum (bila perlu)	3	3	9	Sedang	a. Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam Addendum (bila perlu), b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas	Pelaksanaan pekerjaan tidak mendahulukan pada titik lokasi yang vital.	C	Adanya pelaksanaan fisik di lapangan yang kurang tepat sasaran.	Koordinasi antara pengawas dengan penyedia jasa	4	2	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis c. Pemetaan skala prioritas dalam pelaksanaan perbaikan	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				6	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin = 255 Jembatan	1	Kegiatan survey dilakukan terlalu lama	Adanya kerusakan yang perlu diperbaiki terlalu banyak dan detail	C	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara cepat, tepat akurat dan detail kemudian dituangkan dalam RMK dan penambahan personil	3	3	9	Sedang	Membagi pekerjaan pelaksanaan survey kepada Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Perubahan Volume Pekerjaan dalam penyusunan HPS	Terjadi perubahan penetapan pagu HPS	C	Terlambatnya pelaksanaan penyiapan syarat lelang	pembagian tugas dalam menyiapkan penyusunan dokumen lelang	3	3	9	Sedang	Segera melakukan koordinasi apabila terjadi perubahan volume item pekerjaan	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	Penertiban Jaminan Pelaksanaan terikat oleh regulasi Bank Penjamin	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	2	6	Sedang	a. Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis, b. dilakukan koordinasi secara intens	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

					4	Kegiatan fisik dilaksanakan tidak tepat waktu	Butuh waktu pencocokan volume kebutuhan lapangan dengan volume dalam kontrak awal	C	Mempengaruhi kegiatan fisik di lapangan	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum (bila perlu)	3	3	9	Sedang	a. Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam Addendum (bila perlu), b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
					5	Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas	Pelaksanaan pekerjaan tidak mendahulukan pada titik lokasi yang vital.	C	Adanya pelaksanaan fisik di lapangan yang kurang tepat sasaran.	Koordinasi antara pengawas dengan penyedia jasa	4	2	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis c. Pemetaan skala prioritas dalam pelaksanaan perbaikan	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
					6	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>																	
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1	Kondisi bangunan kotor dan tidak terpelihara	C	Menurunnya kenyamanan pengunjung	a. Koordinasi dengan pelaksana penyedia jasa, b. Dilakukan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga kebersihan	4	3	12	Tinggi	Melaksanakan jadwal pelaksanaan pemeliharaan secara rutin	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan pekerjaan (Jan-Des 2024/12 bulan)
						2	Seleksi gagal	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat seleksi sesuai ketentuan yang berlaku; b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						3	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	manajerial yang optimal	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
1		2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan : 3 Dokumen	1	Seleksi gagal	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan; b. Perencanaan terkait dengan Kualifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

				2	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Seleksi gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan sesuai ketentuan; b. Perencanaan terkait dengan Kualifikasi teknis dan harga yang realistik	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Data tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Petugas melakukan kesalahan dalam menginput data lapangan (Kompetensi SDM Rendah (Man), komputer mengalami kerusakan (Machine))	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	Pengecekan ulang oleh bidang	2	4	8	Sedang	Manajerial yang optimal	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				6	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				7	Penerbitan Kwitansi SPS proses pensertifikatan tidak tepat waktu	Kekurangan kelengkapan administratif dokumen SPS saat akan dilaksanakan pendaftaran di loket	C	Tidak terserapnya anggaran pembayaran SPS dengan maksimal	Melakukan pengecekan sebelum mendaftarkan dokumen SPS di loket	2	4	8	Sedang	Melakukan koordinasi yang intensif dengan kantor BPN setempat	PPTK Bidang Bina Marga	12 bulan
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 3 Dokumen	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistik	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelomnok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				11	Penerbitan Kwitansi SPS proses pensertifikatan tidak tepat waktu	Kekurangan kelengkapan administratif dokumen SPS saat akan dilaksanakan pendaftaran di loket	C	Tidak terserapnya anggaran pembayaran SPS dengan maksimal	Melakukan pengecekan sebelum mendaftarkan dokumen SPS di loket	2	4	8	Sedang	Melakukan koordinasi yang intensif dengan kantor BPN setempat	PPTK Bidang Bina Marga	12 bulan
5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	1	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Paket pekerjaan tdk bisa dilakukan dan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	a. Mempermudah syarat pelelangan b. perencanaan terkait dengan spesifikasi teknis dan harga yang realistis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	Peserta terlambat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan	Petugas tidak memberikan informasi tanggal masa jaminan pelaksanaan dengan jelas (Kompetensi SDM Rendah (Man))	C	Jadwal kontrak mundur dan mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan	Pemberian informasi yang tepat kepada penyedia jasa	3	3	9	Sedang	a. Pemberian informasi yang tepat, jelas dan dokumentasi kepada penyedia jasa, b. Dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan penyedia jasa	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	Tidak semua warga sekitar mengetahui adanya pekerjaan di lokasi	Kurangnya sosialisasi mengenai undangan sosialisasi	C	Kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	Melakukan sosialisasi ke semua warga di sekitar lokasi pekerjaan	2	4	8	Sedang	a. Sosialisasi awal kepada masyarakat, b. Dilakukan koordinasi penentuan jadwal sosialisasi kepada ketua Kelomok masyarakat	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus	C	Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Pendampingan dan monitoring evaluasi yang ketat dari pengguna jasa dan direksi teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang Bina Marga	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1	Terjadinya kecelakaan kerja	Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	3	2	6	Sedang	monitoring penerapan SMK pada lokasi pelaksanaan pekerjaan Prosedur K3	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				2	Tidak ditemukannya air sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang ditentukan dalam kontrak	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi (struktur geologi lingkungan setempat)	UC	Konstruksi dianggap gagal dan tidak dapat dibayarkan	Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada hasil kajian dokumen SED Geologi Lingkungan Air Tanah	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan agar pelaksanaan sesuai dengan hasil kajian SED; b. Koordinasi dengan Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi ESDM	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.

				3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Berpotensi menyebabkan kerusakan fungsi dan umur bangunan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh pengawas lapangan b. Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Instansi, penyedia jasa, calon penerima hibah, perangkat daerah dan warga penerima manfaat sumur bor	C	a. Terjadinya konflik internal antara warga penerima manfaat dan penerima hibah, terutama terkait status kepemilikan tanah oeh warga; b. Terkendalanya proses serah terima hibah dari PA ke penerima hibah; c. Sumur bor tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal ke warga penerima manfaat; d. Terjadi kemacetan lalu lintas; e. Kerusakan jalan dan fasilitas umum yang terkena dampak pembangunan; f. banyak debu dan polusi;	a. Koordinasi awal dengan calon penerima hibah dan warga penerima pemanfaat; b. Konfirmasi status kepemilikan tanah dengan dukuh dan pemohon hibah; c. Pengaturan waktu operasi pengeboran; d. Pengaturan lalu lintas dengan rambu; e. penyiraman rutin jalan dan lokasi kerja;	3	2	6	Sedang	a. Konfirmasi legalitas tanah dengan bukti surat kerelaaan tanah untuk dihibahkan dari pemilik tanah; b. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan;	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
				5	Perubahan rencana lokasi usulan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6		a. Dilakukan identifikasi awal terkait lokasi rencana sumur bor sebelum kegiatan dimulai; c. melakukan verifikasi data usulan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1	Terjadinya kecelakaan kerja	Penggunaan alat berat	C	Luka ringan s.d. berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	3	2	6	Sedang	monitoring penerapan SMKk pada lokasi pelaksanaan pekerjaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				2	Tidak ditemukannya air sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang ditentukan dalam kontrak	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi (struktur geologi lingkungan setempat)	UC	Konstruksi dianggap gagal dan tidak dapat dibayarkan	Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada hasil kajian dokumen SED Geologi Lingkungan Air Tanah	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan agar pelaksanaan sesuai dengan hasil kajian SED; b. Koordinasi dengan Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi ESDM	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
				3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Berpotensi menyebabkan kerusakan fungsi dan umur bangunan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh pengawas lapangan b. Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.

				4	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Instansi, penyedia jasa, calon penerima hibah, perangkat daerah dan warga penerima manfaat sumur bor	C	a. Terjadinya konflik internal antara warga penerima manfaat dan penerima hibah, terutama terkait status kepemilikan tanah oeh warga; b. Terkendalanya proses serah terima hibah dari PA ke penerima hibah; c. Sumur bor tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal ke warga penerima manfaat; d. Terjadi kemacetan lalu lintas; e. Kerusakan jalan dan fasilitas umum yang terkena dampak pembangunan; f. banyak debu dan polusi;	a. Koordinasi awal dengan calon penerima hibah dan warga penerima pemanfaat; b. Konfirmasi status kepemilikan tanah dengan dukuh dan pemohon hibah; c. Pengaturan waktu operasi pengeboran; d. Pengaturan lalu lintas dengan rambu; e. penyiraman rutin jalan dan lokasi kerja;	3	2	6	Sedang	a. Konfirmasi legalitas tanah dengan bukti surat kerelaan tanah untuk dihibahkan dari pemilik tanah; b. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan;	PPTK Bidang SDAD	1 bulan	
				5	Perubahan rencana lokasi usulan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6		a. Dilakukan identifikasi awal terkait lokasi rencana sumur bor sebelum kegiatan dimulai; c. melakukan verifikasi data usulan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	1 bulan	
	3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang disyaratkan	C	Berpotensi menyebabkan kesalahan desain dan kesalahan konstruksi	Monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Supervisi Perencanaan	2	4	8	Sedang	Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Supervisi Perencanaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.	
					2	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Instansi, penyedia jasa, perangkat daerah dan warga calon penerima manfaat air bersih	C	a. Terjadinya konflik internal antara warga calon penerima manfaat dan calon penerima hibah, terutama terkait status kepemilikan tanah oeh warga; b. Rencana Konstruksi Sumur bor tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	a. Koordinasi awal dengan warga calon penerima manfaat dan calon penerima hibah; b. Identifikasi status kepemilikan tanah dengan dukuh	3	2	6	Sedang	a. Konfirmasi legalitas tanah dengan bukti surat kerelaan tanah untuk dihibahkan dari pemilik tanah; b. Mengoptimalkan kegiatan/forum sosialisasi pekerjaan;	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
					3	Perubahan lokasi penyelidikan	Lokasi usulan terlayani PDAM dan SPAMDES	C	Pelaksanaan Pekerjaan Tertunda	Membuat Data Cadangan Usulan	3	2	6		melakukan verifikasi data lokasi penyelidikan agar lebih valid.	PPTK Bidang SDAD	1 bulan
	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : 1 laporan	1	Kegiatan dilaksanakan tidak tepat waktu	Butuh waktu lebih lama untuk mengidentifikasi data primer dan sekunder	C	pengumpulan data primer dan sekunder lebih lama dari rencana sehingga berdampak pada pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Rapat internal untuk monitoring dan progress kegiatan	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan pelaksana pekerjaan dan tim teknis	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Juni - Oktober (5 bulan)
					2	Data yang terkumpul tidak valid dan aktual	Ketersediaan data yang tidak dimiliki oleh narasumber kunci (contoh: kalurahan/kapanewon/OPD pengampu/ Kraton)	UC	Proses penyusunan rekomendasi kebijakan akan mengalami kendala	penyepakatan data	2	2	4	Rendah	Melakukan komunikasi yang intensif dan berkala dengan berbagai unsur-unsur/stakeholder untuk meningkatkan kualitas data.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Juni - Oktober (5 bulan)

**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**

1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1	Pengembangan Lumbung Mataraman	1	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1	Pekerjaan terlambat diserahkan	Manajemen waktu pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan kurang bagus		Denda kepada pelaksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari intansi terkait	3	3	9	Sedang	Diterbitkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM)	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						2	Pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal	waktu pengadaan yang mundur dari jadwal rencana kegiatan	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan rapat evaluasi kegiatan	3	3	9	Sedang	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						3	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan secara rutin	2	4	8	Sedang	a. Mengoptimalkan hasil monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan b. Koordinasi dan monitoring secara berkala oleh PPKom dan Tim Teknis	PPTK Bidang SDAD	6 bulan
						4	Potensi kecelakaan kerja;	tidak menggunakan alat pelindung diri dalam pekerjaan, terjadi kelalaian dalam bekerja di lapangan	C	Luka ringan s.d berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
						5	Terjadinya permasalahan sosial masyarakat.	Tidak ada manajemen lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan saat musim kemarau, penggunaan peralatan bising;	C	Kemacetan lalu lintas di permukiman; Peningkatan polusi debu dan kebisingan;	Pengaturan lalu lintas dengan rambu; Penyiraman rutin pada jalan dan lokasi kerja;	4	3	12	Tinggi	a. Pertemuan berkala dengan masyarakat/menggunakan teleconference maupun langsung; b. Pendekatan sosial masyarakat	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan kontrak kerja.
						6	Harga berubah sewaktu-waktu	Perencanaan kurang matang dalam menentukan nilai kebutuhan	C	Pekerjaan tidak sesuai target	adanya rencana penganggaran hingga tercapai target	3	3	9	Sedang	a. Adanya rencana penganggaran hingga tercapai target serta movev yang ketat , b. dilakukan evaluasi harga sebelum proses pengadaan	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						7	Kesiapan administrasi penyedia jasa tidak tepat waktu	kurangnya tenaga pendukung dalam memproses administrasi pekerjaan	C	Terlambatnya tanda tangan kontrak	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	3	3	9	Sedang	Pengecekan antara penyedia jasa konsultan dan kontraktor	PPTK Bidang SDAD	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 312 unit	1	Tidak semua mengetahui ada pekerjaan di lokasi	Belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	C	kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	melakukan sosialisasi dan menghimbau desa untuk berkoordinasi dengan dukuh dan calon penerima bantuan	2	2	4	Rendah	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT)	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - April (2 bulan)
						2	Tidak semua kalurahan sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa	tiap kelurahan memiliki sumberdaya yang beragam dan pengalaman yang berbeda	UC	keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa	komunikasi secara informal antara OPD dengan kalurahan penerima BKK	4	4	16	Tinggi	1. Sosialisasi dilakukan sebelum awal pelaksanaan pekerjaan kepada kalurahan penerima BKK agar bisa mempersiapkan. 2. Tenaga ahli pendamping akan diminta untuk mendampingi mulai dari proses PBJ sampai pelaporan akhir.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mei - Juli (3 bulan)



					2	Kurangnya pengawasan saat <i>dropping</i> material	1) lokasi rumah penerima bantuan dengan medan beragam; 2) penerima bantuan tidak hadir/diwakilkan saat sosialisasi; 3)Tenaga Ahli Pendamping tidak hadir saat <i>dropping</i> material	C	kualitas dan kuantitas material tidak sesuai dengan kontrak antara penyedia dengan kalurahan	warga dilibatkan dalam mengawasi <i>dropping</i> material	4	4	16	Tinggi	1) Meminta kalurahan untuk menunjuk koordinator dari masyarakat; 2) Melakukan koordinasi dengan koordinator dan penyedia jasa dalam melakukan <i>dropping</i> material	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Juni - November (6 bulan)
					3	Pelaksanaan pembangunan baru rumah layak huni membutuhkan waktu lebih lama	1) Material sudah terima akan tetapi karena masih membutuhkan swadaya sehingga utk pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan baru terlambat 2) jalan yang tidak bisa diakses kendaraan besar sehingga material tidak langsung di rumah penerima	C	pelaksanaan pembangunan baru rumah layak huni tidak sesuai jadwal	melakukan sosialisasi dan menghimbau desa untuk berkoordinasi dengan dukuh dan calon penerima bantuan bahwa pekerjaan membutuhkan keswadayaan dan persiapan teknis	4	3	12	Tinggi	1) Meminta desa/koordinator untuk memberdayakan tukang dari desa setempat/daerah lain; 2) Melakukan koordinasi dengan koordinator dan penerima bantuan untuk segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dari bulan Mei - November (7 bulan)
					4	Terdapat penerima bantuan tidak layak mendapatkan bantuan	Identifikasi penerima bantuan belum di <i>update</i>	UC	adanya perubahan BNBA	verifikasi penerima bantuan	2	2	4	rendah	meminta kalurahan untuk menyiapkan BNBA pengganti	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Mei 2024
					5	Perubahan dan/atau penambahan jenis material diluar panduan dari OPD pendamping	masyarakat sudah memiliki salah satu jenis material, sehingga kalurahan melakukan penyesuaian saat proses PBJ	C	ada material yang tidak sesuai dengan RAB	Melaksanakan sosialisasi kepada kalurahan sebelum proses PBJ	4	3	12	Sedang	tenaga ahli pendamping diminta untuk mengkroscek RAB yang disusun kalurahan dengan RAB pada panduan OPD	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	bulan Mei - November (7 bulan)

**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1	Kegiatan survei di banyak lokasi dengan SDM yang terbatas	kegiatan tidak selesai tepat waktu	UC	kegiatan tidak selesai tepat waktu yang ditentukan	Melaksanakan optimalisasi survey dengan SDM dan waktu yang ada	3	3	9	Sedang	menambah personil survey	PPTK Bidang Cipta Karya	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
---	---	--	---	--	---	---	------------------------------------	----	--	--	---	---	---	--------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1	Kinerja proses Produksi dan Distribusi Air Minum oleh SPAM Regional terhambat	Kekurangan Anggaran untuk biaya operasional produksi dan distribusi	C	Kekurangan biaya operasional seperti pembiayaan jasa listrik akan menyebabkan terhambatnya kinerja peralatan dan produksi air minum	Adanya prioritas pembiayaan untuk operasional produksi dan distribusi air minum	3	3	9	Sedang	Adanya koordinasi dengan Pemda DIY dan Dinas Teknis untuk pengadaan Subsidi Dana Operasional Produksi	PPTK Bidang Cipta Karya	12 bulan
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------------------------	----------

		2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1	Belum optimal dan maksimalnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengelolaan SPAM	Operasional dan Pemeliharaan beberapa peralatan di SPAM Lintas Kabupaten/Kota terhambat karena kekurangan biaya operasional	C	Kekurangan biaya operasional seperti pembiayaan jasa listrik akan menyebabkan terhambatnya kinerja peralatan dan produksi air minum	pengaturan jadwal produksi air minum oleh SPAM Regional dan pengelolaan keuangan untuk prioritas operasional produksi	3	3	9	Sedang	Adanya koordinasi dengan Pemda DIY dan Dinas Teknis untuk pengadaan Subsidi Dana Operasional Produksi	PPTK Bidang Cipta Karya	12 bulan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>																		
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : 1 dokumen	1	Kegiatan dilaksanakan tidak tepat waktu	Butuh waktu lebih lama untuk mengidentifikasi data primer dan sekunder	C	pengumpulan data primer dan sekunder lebih lama dari rencana sehingga berdampak pada pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Rapat internal untuk monitoring dan progress kegiatan	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan pelaksana pekerjaan dan tim teknis	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juni - September 2024 (4 bulan)
						2	Data yang terkumpul tidak valid dan aktual	Ketersediaan data yang tidak dimiliki oleh narasumber kunci (contoh: kalurahan/kapanewon/OPD pengampu/ Kraton)	UC	Proses penyusunan rekomendasi kebijakan akan mengalami kendala	penyepakatan data	2	2	4	Rendah	Melakukan komunikasi yang intensif dan berkala dengan berbagai unsur-unsur/stakeholder untuk meningkatkan kualitas data.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juni - September 2024 (4 bulan)
2	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : 1 dokumen	1	data yang dibutuhkan untuk memiliki format yang beragam	masing-masing OPD pengampu memiliki format data yg beragam	C	kendala dalam proses updating sistem	penyepakatan format data	2	2	4	Rendah	berkomunikasi dengan kabupaten/kota untuk penyepakatan format data	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juli - November 2024
						2	Tampilan sistem informasi tidak user friendly	Banyak data yang ingin ditampilkan	C	Kendala dalam proses input data dan penyajian data	uji coba sistem kepada user	3	3	9	rendah	berkoordinasi dengan kab/kota terkait tampilan sistem	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juli - November 2024
						3	Aplikasi berbasis website diserang oleh eksternal	Adanya kelemahan pada sistem	UC	adanya data yang tidak terekam pada sistem aplikasi	melakukan backup data secara berkala	4	4	16	rendah	berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait sistem informasi	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Juli - November 2024
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 3 unit	1	Tidak semua warga mengetahui ada pekerjaan di lokasi	belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	UC	terkendalanya proses pekerjaan terutama saat ada kendaraan berat masuk ke lokasi	sosialisasi dilakukan dengan mengundang aparat desa dan kecamatan dan secara informal	3	3	9	Sedang	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan kalurahan	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Juni 2024 ( 4 bulan)
						2	Kurangnya pengawasan saat pekerjaan konstruksi	kurang komunikasi antara penyedia dan pengawas	C	pekerjaan tidak sesuai standar	melibatkan aparat desa dan masyarakat dalam mengawasi	3	3	9	sedang	memintakalurahan untuk ikut mengawasi	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Juni 2024 ( 4 bulan)
						3	Kegiatan fisik tidak tepat waktu	faktor cuaca dan kemungkinan ada acara warga sekitar	C	kegiatan fisik tidak selesai dengan tepat waktu	melakukan koordinasi dengan kalurahan sebelum pekerjaan fisik	3	3	9	Sedang	menyampaikan estimasi lama pekerjaan kepada kalurahan	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Juni 2024 ( 4 bulan)
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>																		
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman : 1 laporan	1	Kurangnya data yang terkumpul	Ketersediaan data yang tidak dimiliki oleh narasumber kunci (contoh: desa/kecamatan/OPD pengampu)	C	Kesulitan dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan	penyepakatan data	2	2	4	Rendah	Melakukan komunikasi yang intensif dan berkala dengan berbagai unsur-unsur/stakeholder untuk meningkatkan kualitas data.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Februari s/d november. (10 Bulan)
						1	Kegiatan dilaksanakan tidak tepat waktu	banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap bulannya	C	potensi adanya keterlambatan dalam penyerapan	menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan dengan pekerjaan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih	3	3	9	Sedang	Melakukan Koordinasi yang lebih intensif dengan pelaksana pekerjaan dan tim teknis	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bulan Februari s/d november. (10 Bulan)

2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : 747 unit	1	Tidak semua warga mengetahui ada pekerjaan di lokasi	Belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	C	kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	melakukan sosialisasi dan menghimbau desa untuk berkoordinasi dengan dukuh dan calon penerima bantuan	2	2	4	Rendah	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT)	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Februari - Juni 2024
				2	Kurangnya pengawasan saat <i>dropping</i> material	1) lokasi rumah penerima bantuan dengan medan beragam; 2) penerima bantuan tidak hadir/diwakilkan saat sosialisasi; 3)Konsultan Pengawas tidak hadir saat <i>dropping</i> material.	C	kualitas dan kuantitas material tidak sesuai dengan kontrak	warga dilibatkan dalam mengawasi <i>dropping</i> material	4	4	16	Tinggi	1) Meminta kalurahan untuk menunjuk koordinator dari masyarakat; 2) Melakukan koordinasi dengan koordinator dan penyedia jasa dalam melakukan <i>dropping</i> material	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Juli 2024
				3	Pelaksanaan rehabilitasi rthh/pembangunan baru rumah layak huni membutuhkan waktu lebih lama	1) Material sudah terima akan tetapi karena masih membutuhkan swadaya sehingga utk pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan baru terlambat 2) jalan yang tidak bisa diakses kendaraan besar sehingga material tidak langsung di rumah penerima	C	pelaksanaan rehabilitasi rthh/pembangunan baru rumah layak huni tidak sesuai jadwal	melakukan sosialisasi dan menghimbau desa untuk berkoordinasi dengan dukuh dan calon penerima bantuan bahwa pekerjaan membutuhkan keswadayaan dan persiapan teknis	4	3	12	Tinggi	1) Meminta desa/koordinator untuk memberdayakan tukang dari desa setempat/daerah lain; 2) Melakukan koordinasi dengan koordinator dan penerima bantuan untuk segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Juli 2024
				4	Terdapat penerima bantuan tidak layak mendapatkan bantuan	Identifikasi penerima bantuan belum di <i>update</i>	UC	adanya perubahan BNBA	verifikasi penerima bantuan	3	4	12	Tinggi	menyiapkan data stok calon penerima bantuan di lokasi yang terdapat calon penerima bantuan yang tidak layak Menyiapkan data yang lebih valid dan akuntabel	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Februari - Maret 2024
				5	Perubahan jenis material	masyarakat sudah memiliki salah satu jenis material	C	ada material yang tidak sesuai dengan RAB	Melaksanakan sosialisasi sebelum penandatanganan RAB, untuk dilakukan pencermatan kembali RAB oleh penerima bantuan	4	3	12	Tinggi	calon penerima bantuan diminta untuk mengoreksi RAB yang sudah dibuat dan mengklarifikasi jenis material yang sudah dimiliki/mampu swadaya	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Februari - Maret 2024
				6	Material yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	pembatasan jenis material untuk menyederhanakan proses perencanaan, pengadaan, dan movev. Kebutuhan masyarakat sangat beragam untuk dipenuhi semua	UC	ada material yang sudah dikirim belum/ tidak dimanfaatkan sampai pekerjaan selesai	menghimbau masyarakat memanfaatkan bantuan yang sudah ada	3	3	9	sedang	Mengarahkan masyarakat untuk swadaya material pendukung / bukan material utama atau mengalokasi untuk kebutuhan material selain jenis bantuan yang diterima.	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Februari - Maret 2024

					7	Keswadayaan penerima bantuan yang beragam dan OPD tidak bisa membatasi keswadayaan penerima bantuan	sumber keswadayaan penerima bantuan yang beragam, seperti dibantu keluarga, kepemilikan pohon, dan kepemilikan hewan ternak	UC	apabila penerima bantuan memiliki keswadayaan tinggi, bantuan rehab rumah bisa menjadi bangun baru rumah	menghimbau masyarakat untuk tetap memenuhi jadwal pekerjaan yang sudah ditetapkan	3	3	9	sedang	Mengarahkan masyarakat untuk swadaya material pendukung / bukan material utama serta tetap mematuhi jadwal pekerjaan yang ada dengan didampingi oleh pengawas	PPTK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maret - Juli 2024
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>																	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	Ketidaksinkronan data usulan dalam database dengan fisik proposal yang dikumpulkan	Banyaknya jumlah proposal yang dikumpulkan sehingga resiko kesalahan akibat human error dalam melakukan pendataan sangat tinggi	UC	beberapa usulan memenuhi persyaratan tidak masuk dalam database sehingga ada beberapa lokasi yang tidak dianggarkan	4	3	12	Tinggi	Menganggarkan usulan melalui BKK untuk mempermudah administrasi	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Da ri bulan Maret s/d November (9 bulan)
						2	Kesiapan data pemerintah desa	Kurangnya informasi dan koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan titik lokasi yang akan direncanakan	UC	kesulitan dalam menentukan titik lokasi yang pasti	4	3	12	Tinggi	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT).	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Da ri bulan Maret s/d November (9 bulan)
						3	Tidak semua warga mengetahui ada pekerjaan di lokasi	belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	UC	kurang terpenuhinya aspirasi masyarakat	2	3	6	Sedang	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT).	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Da ri bulan Maret s/d November (9 bulan)
						4	Kegiatan survei lokasi perencanaan dilakukan terlalu lama	adanya perubahan lokasi/jenis pekerjaan dari desa.	UC	kegiatan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Sedang	meminta desa untuk mengonfirmasi list lokasi yang akan disurvei saat sosialisasi dan menunjuk contact person lokasi yang akan disurvei	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Da ri bulan Maret s/d November (9 bulan)
						5	Perubahan jenis pekerjaan	masyarakat mengusulkan jenis pekerjaan yang berbeda yang dirasa lebih dibutuhkan	UC	tidak sesuai usulan masyarakat dengan proposal awal dan dokumen anggaran.	2	2	4	Rendah	sosialisasi dilakukan secara berkala, dan menjalin komunikasi informal dengan pengampu lokasi (contoh: camat/lurah/RT).	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Da ri bulan Maret s/d November (9 bulan)
						6	Jenis pekerjaan sudah dilakukan instansi lain / swadaya oleh masyarakat	instansi dari pemerintah pusat dan/atau kabupaten kota yang bertugas menangani kawasan dan sektor yang sama	UC	adanya pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan Tidak optimanya serapan anggaran	3	5	15	Tinggi	Mengadakan koordinasi berkala dengan OPD pengampu PKP di kabupaten/kota Mengoptimalkan peran desa / LPMD dalam berkoordinasi dengan pemkha/bemkot	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Da ri bulan Maret s/d November (9 bulan)
		1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1	Tidak semua warga mengetahui ada pekerjaan di lokasi	belum tersosialisasinya kegiatan secara menyeluruh	UC	keswadayaan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan maksimal	2	3	6	Sedang	sosialisasi dilakukan dengan mengundang aparat desa dan kecamatan dan secara informal	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Februari s/d Oktober (10 bulan)
						2	Kurangnya pengawasan pada saat penyelesaian pekerjaan konstruksi	tidak cocoknya antara jadwal kegiatan pada pekerjaan yang telah ditentukan dengan yang di lapangan	C	kegiatan fisik tidak selesai dengan tepat waktu dan material yang tidak sesuai standar	3	5	15	Tinggi	meminta desa untuk menunjuk koordinator dari masyarakat	PPTK Bidang Perumahan	Selama proses pelaksanaan pekerjaan. Dari bulan Februari s/d Oktober (10 bulan)

**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN**

1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1	Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	1	Sasaran pendampingan pengendalian pemanfaatan zona konservasi air tanah tidak tepat sasaran	Kurangnya informasi mengenai pekerjaan yang perlu dilakukan pendampingan untuk pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	C	Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah menjadi kurang optimal	Melakukan pengendalian berdasarkan undangan yang masuk	3	2	6	Sedang	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai objek-objek yang diprioritaskan untuk dilakukan pendampingan	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	Insidental dalam 12 bulan
				2	Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah	1	Sasaran pelaku perusahaan yang dibina tidak tepat sasaran	Kurangnya parameter konsiderasi dalam penentuan peserta yang perlu diundang dalam pembinaan maupun yang dilakukan monitoring on site	C	Terdapat pelaku perusahaan air tanah yang membutuhkan pembinaan namun tidak menjadi prioritas pembinaan	Mengundang peserta/melakukan pembinaan lapangan berdasarkan informasi volum perusahaan NPA dan status perizinan setiap bulan	1	5	5	Rendah	Melakukan koordinasi dengan BP3ESDM DIY untuk menjaring informasi peserta yang membutuhkan pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	Bulan Mei 2024
						2	Materi pembinaan yang diberikan kurang aktual	Dinamika regulasi pengaturan perusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah di tingkat pusat yang sangat tinggi	C	Terjadi kekeliruan informasi yang diberikan kepada peserta pembinaan	Berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk meminta update informasi regulasi yang berlaku	2	5	10	Sedang	Mengundang narasumber dari Badan Geologi dalam acara Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	Bulan Mei 2024
				3	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah	1	Pengukuran dengan AWLR mengalami kerusakan /offline	Perangkat AWLR mengalami kerusakan komponen maupun kendala offline akibat tidak adanya pemeliharaan/perawatan perangkat	C	Data muka air tanah pada sumur pantau menjadi tidak diketahui dan mengganggu monitoring dan evaluasi muka air tanah	Pemeliharaan sederhana berupa pengisian pulsa GSM dan pulsa listrik	5	1	5	Rendah	Melakukan pengukuran secara manual dengan <i>water level sounding</i> secara berkala setiap bulan	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	12 Bulan
		2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1	Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman	1	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal	Adanya tahap pekerjaan yang meleset dari jadwal	C	Pekerjaan selesai tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan	Pembuatan jadwal pada KAK dengan jelas	1	5	5	Rendah	Evaluasi internal pelaksanaan tahapan pekerjaan secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan penyedia untuk dapat menyelesaikan tahapan pekerjaan sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
						2	Hasil kajian tidak tepat sasaran	Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan	C	Kajian kurang dapat memenuhi tujuan pelaksanaannya	Pembuatan detail pekerjaan yang jelas dan terukur pada KAK	2	5	10	Sedang	Mengundang narasumber dari akademisi pada paparan hasil untuk dapat memberikan masukan terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	1	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	1	Kesalahan/Ketidaktepatan Penghitungan data NPA	Dinamika data pengguna air tanah maupun volum perusahaan air tanah dengan objek yang sangat tinggi setiap bulannya	C	Adanya kesalahan dalam penetapan NPA yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak air tanah	Review berjenjang secara manual	4	4	16	Tinggi	Penggunaan kalkulator NPA untuk mempermudah penghitungan dan review hasil penghitungan data NPA	Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	12 Bulan

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA																		
1	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	Pembinaan tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar	Tingkat kesadaran pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar masih rendah	C	Kaidah pertambangan yang baik dan benar tidak diterapkan sehingga membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar dan tidak memberikan dampak kesejahteraan masyarakat	Sosialisasi akan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar bagi kelanjutan usaha pertambangan serta pemberian sanksi bagi yang belum menerapkan atau melanggar	3	3	9	sedang	Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan usaha pertambangan dan pelaku usaha pertambangan	PPTK Bidang ESDM	12 bulan
						2	Harga jual komoditas tambang di lokasi tambang kurang akurat	survei harga jual komoditas tambang tidak dilakukan di semua lokasi tambang dan kurang detail	C	SK Gubernur tentang penetapan harga patokan penjualan komoditas tambang tidak sesuai dengan kondisi di lokasi tambang dan bisa merugikan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha tambang	Memerintahkan kepada penyedia jasa agar melakukan survei dengan benar di semua lokasi tambang dan lebih detail dalam menentukan klasifikasi komoditas tambang serta konversi ritase ke meter kubik	3	3	9	sedang	Koordinasi dan komunikasi dengan Penyedia Barang/ Jasa dan asosiasi pelaku tambang	PPTK Bidang ESDM	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	1	kelanjutan izin-izin yang dikeluarkan pusat dengan ketentuan persyaratan yang lebih longgar dengan ketentuan Pergub Nomor 39 Tahun 2022 yang lebih ketat dapat menimbulkan permasalahan penerbitan perizinan perusahaan pertambangan	Ketentuan Pergub 39 Tahun 2022 dalam penerbitan izin lebih ketat dan memerlukan rekomendasi/persetujuan dari instansi lain	C	pelayanan perizinan perusahaan pertambangan lebih lama, adanya keberatan dari pemohon izin perusahaan pertambangan	sosialisasi pelaksanaan Pergub 39 tahun 2022 dan merevisi Pergub 39 tahun 2022 sebagai tindak lanjut identifikasi permasalahan pelaksanaan pergub tersebut	2	3	6	sedang	koordinasi dengan DPMPTSP, OPD penerbit rekomendasi/persetujuan dan Biro Hukum Setda DIY	PPTK Bidang ESDM	12 bulan
						2	Draft Raperda kurang aplikatif untuk diterapkan dan kurang mengakomodir ketentuan dan kearifan lokal yang sesuai dengan kondisi DIY	(i) Penyusunan Naskah Akademik hanya mengacu ke Peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional (ii) Perbedaan persepsi terkait makna "delegasi" dari Perpres 55 Tahun 2022	C	Draft Raperda kurang optimal dan sulit diterapkan dan memerlukan banyak revisi dalam pembahasan Raperda	1. penekanan pada KAK pekerjaan untuk menyesuaikan dengan kondisi DIY 2. penentuan Tenaga Ahli yang sesuai	2	3	6	sedang	Koordinasi dan komunikasi dengan Penyedia Barang/ Jasa, OPD yang bertanggung jawab terhadap perusahaan pertambangan dan asosiasi pelaku tambang	PPTK Bidang ESDM	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1	Kelengkapan data administrasi dan teknis belum benar dan lengkap	Pemohon belum memahami secara menyeluruh persyaratan administrasi dan teknis pengajuan IUPTLS /LUPTLS (izin operasi)	C	Pengembalian berkas permohonan	(i) penyempurnaan keterangan persyaratan/prosedur pengajuan izin (ii) penyampaian informasi penjelasan persyaratan permohonan izin	2	2	4	Rendah	Melakukan koordinasi dengan DPM PTSP DIY dan memberikan instrumen penjelasan/informasi terkait persyaratan perizinan agar dapat tersampaikan kepada calon pemohon.	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	12 bulan
						2	Pembinaan perizinan ketenagalistrikan tidak optimal	(i) kurangnya kepedulian obyek / pelaku wajib izin ketenagalistrikan (ii) informasi urgensi izin ketenagalistrikan tidak tersampaikan dengan baik (iii) metode pembinaan yang kurang efektif	C	Laju pertumbuhan izin ketenagalistrikan rendah	publikasi regulasi dan urgensi izin ketenagalistrikan	2	2	4	Rendah	(i) menyiapkan instrumen publikasi (ii) menyusun surat himbauan perizinan ketenagalistrikan (iii) koordinasi dengan Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM.	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	12 bulan
						3	Pelaksanaan penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah DIY tidak tepat waktu dan substansi hasilnya tidak aplikatif serta tidak sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional	(i) gagal lelang (ii) kurangnya koordinasi stakeholder dan data yang tidak lengkap/valid (iii) analisa RUKN tidak komprehensif	C	Penetapan RUKD terhambat	(i) penyusunan tata kala pengadaan yang akurat (ii) pemetaan stakeholder ketenagalistrikan yang komprehensif dan evaluasi RUKN dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten	3	3	9	Sedang	(i) menyiapkan tata kala pelaksanaan pengadaan dan kegiatan yang akurat (ii) menyusun KAK dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	5 bulan
2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	Pelaksanaan pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga belum tersalurkan sesuai target yang diharapkan	Data yang tersedia dalam BDT tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	UC	Masih terdapat rumah tangga miskin yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga karena : 1. tidak termasuk dalam BDT 2. jarak rumah dengan jaringan listrik melebihi ketentuan PLN 3. NIK dipakai orang lain 4. dinamika di lapangan seperti pindah rumah/meninggal dunia 5. telah mendapat bantuan dari pihak lain/secara swadaya	Pelaksanaan Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik dilakukan terhadap Rumah Tangga yang sudah terverifikasi	3	3	9	Sedang	1. Menggunakan jasa konsultan untuk melakukan Verifikasi data rumah tangga belum berlistrik sebelum melaksanakan kegiatan konstruksi 2. Melakukan survey lapangan dan koordinasi dengan pihak PLN dalam rangka verifikasi data	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

				2	Ketidaksesuaian data lapangan dengan TNP2K/DTKS yang berhak menerima subsidi listrik yang telah ditetapkan pemerintah	Belum dilakukan updating data rumah tangga miskin dari tingkat kecamatan	UC	Terdapat rumah tangga miskin yang tidak dapat menerima subsidi listrik	(i) Updating data DTKS (ii) Koordinasi dengan PLN	3	3	9	Sedang	(i) Melakukan koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM selaku penyetap subsidi listrik bagi rumah tangga miskin (ii) Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota (Kapanewon/Kalurahan) untuk dapat melakukan pembaruan data rumah tangga miskin belum berlistrik dan update pelaporan subsidi listrik bagi rumah tangga miskin	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
--	--	--	--	---	---	--	----	--	--	---	---	---	--------	--	---	-----------------------------------

**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**

1	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka Energi Baru Terbarukan	1	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1	Informasi pemanfaatan potensi EBT tidak terpublikasikan dengan baik kepada masyarakat	(i) cakupan target sosialisasi tidak merata (ii) tidak melibatkan stakeholder yang terlibat dalam pemanfaatan EBT di DIY	C	(i) Peran serta masyarakat dalam pengembangan EBT menjadi kecil (ii) Capaian pemanfaatan EBT tidak sesuai target	(i) pemetaan stakeholder EBT di DIY secara komprehensif (ii) pemilihan metode publikasi yang tepat	2	2	4	Rendah	Rapat koordinasi dan dapat dengan melibatkan akademisi	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	12 bulan
						2	Pendataan pemanfaatan ebt tidak akurat	Metode perolehan data tidak tepat	C	Perhitungan capaian pemanfaatan ebt tidak tepat	standarisasi pendataan pemanfaatan ebt	2	2	4	Rendah	(i) Pembuatan form standart pendataan pemanfaatan ebt (ii) money pencapaian pemanfaatan ebt	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	12 bulan
						3	Pemeliharaan pembangkit EBT tidak optimal	(i) pemilihan material tidak sesuai kondisi (ii) metode pemeliharaan tidak sesuai	C	Operasional pembangkit ebt tidak optimal	analisa detail kebutuhan pemeliharaan dan kondisi lingkungan pembangkit ebt	2	2	4	Rendah	Pembuatan analisa kondisi eksisting pembangkit dan rencana kebutuhan pemeliharaan ebt	Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

**BALAI PIALAM**

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat : 26791 rumah tangga	1	Waktu penyusunan DED	Pelaksanaan pemeliharaan jaringan air limbah kota yogyakarta (jalan mataram) berdasarkan DED yang sudah dibuat.	C	Penyusunan DED yang tidak tepat waktu dapat berpengaruh pada mundurnya waktu pelaksanaan pekerjaan.	data pendukung dalam penyusunan DED disiapkan lebih awal.	2	2	4	Sedang	Persiapan penyusunan DED dilaksanakan lebih awal.	PPTK Balai Pialam	2 bulan
						2	Penyusunan KAK yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal	Manajemen waktu pelaksanaan penyusunan KAK kurang bagus	C	Waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana.	pembuatan target waktu penyelesaian penyusunan KAK	3	3	9	sedang	dibuatkan tabel jadwal kegiatan (Meningkatkan kinerja agar penyusunan KAK tepat waktu tidak terlambat).	PPTK Balai Pialam	2 bulan
						3	Pelelangan gagal	Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3	C	Target jumlah pendaftar tidak terpenuhi	Memperluas cakupan pengumuman	2	4	8	Sedang	Mempermudah syarat pelelangan	PPTK Balai Pialam	3 bulan
						4	Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan rencana	Kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas	C	Hasil pekerjaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	PPTK Balai Pialam	3 bulan



				5	Pemeliharaan yang kurang maksimal	Kurangnya pengawasan	C	Hasil pemeliharaan yang kurang maksimal	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	2	4	8	Sedang	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	PPTK Balai Pialam	3 bulan
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Potensi terjadinya kontaminasi oleh kuman pada saat pengambilan sampel tinja dari truck tangki tinja	kontak dengan air limbah dan sampah di jaringan yang banyak mengandung bibit penyakit	C	petugas menjadi sakit	Penggunaan alat-alat perlindungan keselamatan kerja dan mematuhi SOP yang ada;	3	3	9	Sedang	pengawasan terhadap penggunaan alat pengaman diri dan pengawasan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				2	hasil uji di lab terakreditasi tidak sesuai jadwal	banyaknya orang yang melakukan pengujian kualitas air	C	data yang diperlukan terlambat diperoleh	memperhitungkan pengiriman sampel ke laboratorium terakreditasi sampai dengan hasil uji bisa didapatkan	2	2	4	Rendah	membuat jadwal dan kesepakatan bersama dengan pihak laboratorium	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				3	anggaran tidak mencukupi untuk melakukan pengujian	adanya kenaikan harga analisa di tengah tahun tanpa pemberitahuan	C	pengurangan jumlah sampel dan parameter uji	pihak balai selalu update biaya uji analisa setiap penganggaran an menanyakan jika nantinya ada kenaikan harga uji analisa	3	3	9	Sedang	melebihkan sedikit anggaran pada uji analisa agar sewaktu waktu ada kenaikan harga tidak mengurangi jumlah parameter uji	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				4	Potensi terjadinya kecelakaan dalam uji dilaboratorium	kurang hati hati dalam melakukan pengujian dilaboratorium	C	petugas menjadi sakit	petugas laboratorium harus memahami SOP dalam pengujian bahan di laboratorium serta Penggunaan alat-alat perlindungan keselamatan kerja	3	3	9	Sedang	pengawasan terhadap penggunaan alat pengaman diri dan pengawasan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				5	Potensi penyebaran Covid19 pada pelaksanaan konstruksi pada jaringan limbah dan pertemuan teknis konstruksi;	Terjadinya kerumunan orang;	C	- Peningkatan kemungkinan penyebaran Covid19;	Penggunaan alat-alat pelindung kesehatan protokol Covid19 dan alat pelindung keselamatan kerja	4	3	12	Tinggi	Instruksi kepada Penyedia : - Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid19 dan keselamatan kerja;	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				6	Potensi kecelakaan kerja;	penggunaan alat alat konstruksi	C	Luka ringan s.d berat pada pekerja dan masyarakat;	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP;	4	3	12	Tinggi	- Pengawasan K3 pelaksanaan konstruksi;	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				7	Pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Butuh waktu dan kecermatan dalam mencocokkan volume lapangan dengan volume kontrak awal	C	Terlambatnya pelaksanaan kontrak	Mengadakan pemeriksaan lapangan secara bersama untuk review desain kemudian dituangkan dalam RMK dan Addendum kontrak	3	3	9	Sedang	Mengadakan teguran secara lisan maupun tertulis	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
				8	masa pelaksanaan yang tidak tepat waktu	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan kurang bagus	C	laksana pekerjaan	Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	3	3	9	Sedang	- Pelatihan kepada pengawas lapangan - Monitoring pekerjaan dari pengawas lapangan	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

9	terjadinya sumbatan pada jaringan pipa air limbah	-adanya sampah yg dibuang di saluran limbah, adanya akar tanaman yang merusak jaringan pipa -pembangunan saluran air limbah yang tidak sesuai dengan perencanaan konstruksi	C	adanya sampah dapat menyumbat pipa jaringan air limbah sehingga air limbah meluap, adanya kerusakan (bisa karena akar tanaman, kesalahan dalam pembangunan) menyebabkan kerusakan pada jaringan di sekitar jalan raya sehingga dapat membahayakan pengguna jalan	> Rutin dilakukan pembersihan saluran pipa air limbah sehingga aliran limbah menjadi lancar > perbaikan jaringan secara cepat dan segera melalui kegiatan swakelola maupun melalui pihak ke 3	3	3	9	Sedang	> Rutin dilakukan pembersihan saluran pipa air limbah sehingga aliran limbah menjadi lancar > perbaikan jaringan secara cepat dan segera melalui kegiatan swakelola maupun pihak ke 3 > kusus untuk kegiatan swakelola mempersiapkan tim tanggap darurat yang siap 24 jam untuk segera melakukan perbaikan serta mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang terutama jika kerusakan ada di badan jalan raya	PPTK Balai Pialam	12 bulan
10	Potensi penyebaran Covid19 pada saat bertemu dengan pihak eksternal (mekanik dari pihak ke 3)	terjadinya kontak antara pegawai dengan teknisi pihak ke 3 dalam perbaikan alat/instalasi	C	kemungkinan penyebaran Covid19.	(i). Pengenaan alat-alat pelindung kesehatan; (ii). Pelaksanaan protokol kesehatan 3 M;	3	3	9	Sedang	Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid19	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
11	Instalasi lumpur tinja kapasitas penampungannya sudah penuh	peningkatan tangki tangki tinja dari berbagai daerah	C	pengolahan lumpur tinja tidak optimal	pengoperasian secara maksimal serta melakukan review design terhadap IPLT	3	3	9	Sedang	Mengoptimalkan hasil review design sebagai dasar untuk melakukan optimalisasi IPLT	PPTK Balai Pialam	12 bulan
12	Potensi terjadinya kontaminasi oleh kuman pada saat pengambilan sampel tinja dari truck tangki tinja	kontak dengan air limbah dan sampah di jaringan yang banyak mengandung bibit penyakit	C	petugas menjadi sakit	Penggunaan alat-alat perlindungan keselamatan kerja dan mematuhi SOP yang ada;	3	3	9	Sedang	pengawasan terhadap penggunaan alat pengaman diri dan pengawasan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
13	Potensi terjadinya kecelakaan lalulintas saat melakukan pengambilan sampel tinja	banyaknya truck yang lalu lalang dikawasan IPAL	C	Luka ringan s.d. berat pada petugas	Pelaksanaan prosedur kerja yang benar sesuai dengan SOP, berhati hati dalam pelaksanaan pekerjaan	3	3	9	Sedang	Meningkatkan kesadaran kepada petugas agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan
14	Potensi terjadinya kecelakaan dalam uji dilaboratorium	kurang hati hati dalam melakukan pengujian dilaboratorium	C	petugas menjadi sakit	petugas laboratorium harus memahami SOP dalam pengujian bahan di laboratorium serta Penggunaan alat-alat perlindungan keselamatan kerja	3	3	9	Sedang	pengawasan terhadap penggunaan alat pengaman diri dan pengawasan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur kegiatan	PPTK Balai Pialam	Selama masa pelaksanaan pekerjaan

					15	alat, mesin, instalasi mengalami kerusakan	- kondisi mesin dan instalasi di IPAL Sewon sudah berusia tua (sebagian besar lebih dari 20 tahun)	C	jika mesin rusak/mati akan mengganggu proses pengolahan air limbah di balai PIALAM	>perawatan rutin terhadap mesin dan alat /instalasi (pengisian olie, filter dll tidak boleh terlambat) >penganggaran setiap tahun untuk pemeliharaan mesin termasuk penggantian spare part	3	3	9	Sedang	>pengecekan dan pengawasan berkala terhadap seluruh alat, mesin dan instalasi IPAL >penggantian spare part secara rutin > jika diperlukan dilakukan peremajaan terhadap alat/mesin yang memang sudah tidak dapat diperbaiki melalui program Optimalisasi IPAL	PPTK Balai Pialam	12 bulan
					16	Hasil analisa Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan tidak memnuhi baku mutu lingkungan	adanya limbah ikutan non domestik yang masuk ke dalam unit instalasi pengolahan Air Limbah	C	Parameter BOD dan COD, dan lainnya air limbah dari jaringan melebihi baku mutu lingkungan	analisa laboratorium untuk air limbah dari jaringan	4	4	16	tinggi	pengawasan terhadap hasil laboratorium air terhadap air masuk ke IPAL	PPTK Balai Pialam	1 tahun

**BALAI JAKON**

**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pelatihan Tenaga Ahli konstruksi sebanyak 200 orang (5 angkatan)	Pelatihan Tenaga Ahli konstruksi yang sebanyak 200 orang (5angkatan) tidak diikuti dengan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang hanya sebanyak 80 orang (2 angkatan) sehingga mengurangi minat peserta untuk mengikuti pelatihan	Kewenangan uji kompetensi/sertifikasi berada di luar SKPD	UC	Pelaksanaan mundur dari jadwal, target jumlah peserta tidak terpenuhi	Koordinasi awal, respon cepat setelah kebijakan ditetapkan	2	2	4	Rendah	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terlibat	Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi	12 bulan
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebanyak 80 orang (2 angkatan)	Keterlambatan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi dikarenakan masalah administrasi	Kewenangan uji kompetensi/sertifikasi berada di luar SKPD	C	Administrasi peserta yang kurang lengkap sehingga mempengaruhi progres di sistem	Koordinasi awal, respon cepat setelah kebijakan ditetapkan	2	2	4	Rendah	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terlibat	Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi	12 bulan

		3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 800 lembaga		Jumlah sampel yang masuk dari pelanggan melebihi kapasitas kemampuan pengujian	Keterbatasan SDM dan peralatan pengujian	C	Terjadinya antrian pengujian, durasi pengujian melebihi target waktu yang penyelesaian yang sudah ditentukan	Melakukan pengelolaan manajemen antrian pelanggan, menjalin komunikasi intens dengan pelanggan perihal perkiraan durasi total pengujian, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengujian	2	2	4	Rendah	a. Melakukan maintenance alat secara berkala guna menghindari kerusakan/trouble/breakdown di luar jadwal b. Secara periodik, menggunakan aplikasi SIMLAB sebagai sarana pendaftaran dan memantau progress pengujian bagi para customer c. Memberdayakan sosial media dan narahubung kepada pelanggan guna koordinasi, komunikasi dan monitoring progres pengujian d. Melakukan pengujian secara efektif dan efisien sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditentukan e. Melakukan pemeliharaan serta modifikasi/otomasi alat guna meringankan beban kerja	Kepala Seksi Pengujian	12 bulan
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi sebanyak 1 laporan		Terbatasnya database, SDM dan sarana prasarana sebagai dasar kebijakan pembinaan jasa konstruksi daerah	Keterbatasan data, SDM, sarana prasarana	C	Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	Menyusun database secara berkala	2	2	4	Rendah	Memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait	Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi	12 bulan
		2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi cakupan provinsi		Terbatasnya database, SDM dan sarana prasarana sebagai dasar kebijakan pembinaan jasa konstruksi daerah	Keterbatasan data, SDM, sarana prasarana	C	Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	Menyusun database secara berkala	2	2	4	Rendah	Memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait	Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi	12 bulan
<b>BP3ESDM</b>																		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>																		
1	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terkumpul = 1 Dokumen	1	Pengambilan volume air tanah untuk keperluan usaha tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pengambilan air tanah oleh pemegang izin tidak sesuai volume yang diizinkan dan rendahnya kepedulian perusahaan air tanah dalam memasang serta memastikan fungsi meteran air agar penghitungan volume air tanah akurat	C	Potensi adanya penurunan muka air tanah	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	3	3	9	Sedang	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan

		2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi = 1 Laporan	1	Pengusahaan air tanah tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Kurangnya kepatuhan pemegang izin perusahaan air tanah sesuai ketentuan dan rendahnya kepedulian perusahaan air tanah tidak berizin terhadap pentingnya pengaturan atas pemanfaatan air tanah dalam mendukung konservasi air tanah	C	Pemanfaatan perusahaan air tanah yang berlebih dan tidak sesuai dengan regulasi dan rekomendasi teknis dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	3	3	9	Sedang	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>																		
1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil = 1 Laporan	1	Kegiatan usaha pertambangan berada di luar wilayah izin usaha pertambangan yang telah ditetapkan	Kurangnya ketaatan pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan perizinan	C	Adanya konflik terhadap pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	4	4	16	Tinggi	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan
2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut = 1 Laporan	1	Kurangnya kepatuhan pemrakarsa dalam melaksanakan usaha pertambangan sesuai regulasi yang berlaku	Pemrakarsa belum peduli terhadap potensi dampak kerusakan lingkungan serta pengambilan mineral bukan logam dan batuan tidak dilaporkan akibat pelaksanaan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi	C	Pelaksanaan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta inventarisasi dan pendataan penambangan tanpa izin sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	4	4	16	Tinggi	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta inventarisasi dan pendataan penambangan tanpa izin sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan

3	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam = 1 Laporan	1	Tidak terkendalinya harga jual mineral bukan logam dan batuan	Pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari lokasi berizin dan tidak berizin	C	Persaingan harga jual mineral bukan logam dan batuan	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai ketentuan	3	3	9	Sedang	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai ketentuan	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>																		
1	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah = 1 Laporan	1	Pemanfaatan EBT kurang optimal	Kurangnya kepedulian dan pengetahuan pengguna EBT terhadap manfaat EBT	C	Rendahnya jumlah EBT yang dimanfaatkan	Inventarisasi, pendataan fungsi, pengawasan pemanfaatan, dan pemeliharaan rutin EBT sesuai SOP yang berlaku	3	2	6	Sedang	Inventarisasi, pendataan fungsi, pengawasan pemanfaatan, dan pemeliharaan rutin EBT sesuai SOP yang berlaku	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>																		
1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi = 1 Laporan	1	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	Kurangnya kepedulian penyedia dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	C	Potensi terjadinya pencemaran lingkungan (udara, suara) dan kebakaran	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan serta inventarisasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak berizin sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	3	3	9	Sedang	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan serta inventarisasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak berizin sesuai regulasi dan SOP yang berlaku	PPTK BP3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul & BP3ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	12 Bulan

Keterangan:

- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD masing-masing.
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra. Jika memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan maka membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah tujuan yang ada.
- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama kegiatan utama sesuai pengelompokan dalam pencapaian tujuan (sesuai matrik Rencana Strategik)
- (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
- (4) Untuk no. diisi dengan kode/nomor risiko;
- (5) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
- (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
- (7) Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
- (8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
- (9) Diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
- (10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
- (13) Diisi dengan peringkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim;
- (14) Diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya);



**PENILAIAN RISIKO KECURANGAN / FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini ( <i>Current Risk</i> )			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor <i>likelihood</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	
A	Urusan PUPKP & ESDM	1. Gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan	Penyedia Jasa memberikan gratifikasi untuk memperlancar pekerjaan antara lain : Penggunaan bahan dan pembuatan ukuran tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana.	Penyedia jasa, PPK, PPTK	Penyuapan	Kepala Dinas PUPESDM DIY	1. Lemahnya Integritas Pihak Terkait 2. kurang maksimalnya pengawasan oleh PPKom, Tim Teknis, dan Konsultan pengawas 3. Lemahnya partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pihak terkait	Pemakluman terhadap hasil pekerjaan	1. penurunan spesifikasi, karena sudah diberikan gratifikasi 2. Kerugian Negara 3. Menurunnya reputasi organisasi 4. adanya penurunan kualitas bangunan (Fisik Konstruksi) yang menyebabkan umur bangunan tidak lama	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Layanan pengaduan 3. Pengawasan secara rutin 4. uji Lab bahan sebelum pelaksanaan pekerjaan 5. Teguran secara tertulis 6. dilakukan rapat koordinasi secara berkala	2	4	8	Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengujian bahan dan struktur di Lab yang terpercaya Menerapkan teknologi pabrikasi untuk meminimalisir spek bangunan yang rendah.
		2. Paket Pengadaan menghindari tender	HPS Pekerjaan sejenis dibuat dibawah nilai tender	PPK, PPTK	1. Menghindari tender 2. Kolusi	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Lemahnya penganggaran dalam penentuan paket pekerjaan	Banyak paket pengadaan langsung dengan nilai HPS mendekati nilai tender	1. Kerugian Negara akibat pemborosan 2. kesulitan dalam pemantauan pelaksanaan pekerjaan	1. Reviu usulan pemaketan pekerjaan oleh PA/KPA	3	3	9	Mengoptimalkan pengawasan melekat agar pelaku usaha tidak bisa berinteraksi langsung dengan PPK
		3. Memanipulasi Laporan Pekerjaan oleh konsultan pengawas akibat permintaan penyedia jasa	Laporan Progress pekerjaan tidak sesuai realisasi di lapangan dengan penambahan prosentase hasil pekerjaan.	PPK, PPTK, penyedia jasa	kecurangan dalam penyusunan laporan progres pekerjaan	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Adanya tuntutan nilai minimal progres pekerjaan yang harus di capai oleh penyedia jasa. Terkait dengan syarat penagihan pembayaran.	Hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan laporan progres pekerjaan	Kerugian negara akibat mengeluarkan uang untuk progres pekerjaan yang tidak sesuai	1. Reviu Tim Teknis Pekerjaan 2. <i>Back up</i> Penagihan	3	3	9	1. Monitoring oleh PPK 2. Rapat Progress secara rutin dengan tim teknis di lapangan 3. Dilakukan detail perencanaan pekerjaan untuk mencapai Target minimal progres untuk syarat penagihan dan penyiapan perencanaan sedari awal
		4. Penerbitan Rekomendasi Teknis Sub urusan air tanah dan geologi sesuai permintaan pemohon/ pihak tertentu	Tidak dilakukan pengecekan dokumen pendukung dalam penerbitan Rekomendasi Teknis	Pemohon, Dppm, Bidang ESDM	Eksplotasi air tanah melebihi ambang batas	Kepala Dinas PUPESDM DIY	1. Kurangnya pengawasan internal 2. SOP tidak dilaksanakan	Penurunan muka air tanah lebih dari 20%	1. Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengambilan air tanah yang berlebih 2. Turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya Air Tanah yang berkelanjutan 3. Menyebabkan kekurangan air tanah bagi warga di sekitar tempat kegiatan usaha	1. Forum konsultasi publik 2. SOP dan Standar Pelayanan Dinas PUPESDM DIY 3. Reviu berjenjang internal dinas dalam penerbitan Rekomendasi Teknis	2	4	8	1. Pelaksanaan pelayanan pemberian Rekomendasi Teknis yang sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan. 2. Pelaksanaan reviu berjenjang internal dinas dari staf hingga Kepala Dinas. 3. Pembuatan ringkasan perhitungan Rekomendasi Teknis untuk kemudahan reviu berjenjang 4. Pelaksanaan audiensi dengan pelaku usaha/ pemrakarsa dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM
		5. Penghitungan NPA yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran Pajak Air Tanah dikurangi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah tidak mengacu : 1. cara perhitungan yang diamanatkan dalam Pergub DIY No 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah 2. pencatataan volume perusahaan Air Tanah yang terbaca pada Water Meter Pelaku Usaha atau perhitungan volume yang diamanatkan dalam Pergub DIY No 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah 3. Data HAB yang ditetapkan dengan Keppub DIY No 102 Tahun 2021 tentang Penetapan HAB untuk Air Tanah Th 2021	Wajib pajak, BPKAD kabupaten/kota , Bidang ESDM	Nilai NPA lebih rendah dari nilai ekonomi air tanah	Kepala Dinas PUPESDM DIY	1. Peerhitungan NPA tidak sesuai Pergub DIY No 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah 2. Lemahnya pengawasan atasan	tarif pajak air tanah rendah	1. Turunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan Retribusi Pajak Air Tanah 2. Turunnya PAD Kabupaten/ Kota 3. Reviu berjenjang internal dinas dalam penetapan NPA	1. Rekonsiliasi berkala data volume perusahaan Air Tanah dan hasil penetapan NPA dengan BKAD Kab/ Kota 2. Rekonsiliasi dengan BP3ESDM mengenai pencatatan/ penghitungan data volume perusahaan Air Tanah 3. Reviu berjenjang internal dinas dalam penetapan NPA	2	4	8	1. Pelaksanaan reviu berjenjang internal dinas dari staf hingga Kepala Dinas 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data bersama BKAD Kab/ Kota maupun dengan BP3ESDM selaku pihak yang mencatat/ menghitung volume perusahaan Air Tanah. 3. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku perusahaan Air Tanah untuk memasang <i>water meter</i> di posisi yang tepat untuk meningkatkan keakuratan volume Air Tanah yang tercatat. 4. Rencana pembuatan media berupa software alat bantu/ kalkulator penghitungan NPA untuk meminimalisasi resiko kesalahan penghitungan dan efisiensi waktu pengerjaan

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor likelihood
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	Transaksi Pendapatan	6 Penggelapan dana penerimaan retribusi	Penggelapan atas Penerimaan Retribusi dan atau Pajak yang dipungut atau di terima	Pengguna jasa, petugas pelayanan	Penggelapan atas Penerimaan Retribusi dan atau Pajak yang dipungut atau di terima	Kepala Dinas PUPESDM DIY dan Pemda diy	Lemahnya pengawasan terhadap penerimaan dan penyetoran retribusi ke negara.	target pendapatan tidak tercapai	Kerugian keuangan negara, Insentif tidak dapat dcairkan karena target pendapatan tidak tercapai	Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses penerimaan dan penyetoran Retribusi, Penggunaan QRIS sebagai media pembayaran, Pemasangan CCTV	2	2	4	a). memberikan pengawasan yang ketat kepada petugas pemungut pajak dan retribusi b). memberikan sanksi yang tegas kepada petugas yang menerima suap
C	Transaksi Pengeluaran	7 Pembayaran tidak sah	1.Membuat bukti pengeluaran fiktif yang ditagihkan kepada unit kerja 2. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah tanggal bukti yang sudah pernah ditagihkan ke unit kerja (pemeliharaan aset) 3. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	1. Kasub Bag Keuangan; 2. Kasubag Umum; 3. Bendahara Pengeluaran	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset )	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Kurangnya pelatihan internal tentang penatausahaan keuangan kepada semua personil di Kelompok Substansi Keuangan	Pengambilan uang dilakukan tanpa melibatkan orang lain (misal bendahara)	Kerugian negara/daerah	1. Terdapat pemisahan fungsi masing-masing pegawai terkait transaksi pengeluaran pada Kelompok Substansi Keuangan, yaitu terdapat Pembantu Penatausahaan Keuangan yang terdiri dari verifikasi keuangan dan pembuat laporan akuntansi, Bendahara pengeluaran yang dibantu oleh pengadministrasi keuangan dan pengelola Cash Management System (CMS). Selain itu, pada setiap sub bagian terdapat PUMK yang bertugas mengajukan kebutuhan dana kepada bendahara pengeluaran berdasarkan DPA/anggaran kas; 2. Verifikasi bukti telah dilakukan oleh masing-masing fungsi namun belum terdapat mekanisme sampling terhadap bukti-bukti mencurigakan untuk dilakukan konfirmasi; 3. Terdapat mekanisme penghitungan kembali rincian pengeluaran dengan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebelum melakukan pembayaran. Bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi SIPD sebagai kendali keuangan yang didukung dengan kertas kerja untuk memastikan bahwa total pengeluaran sama dengan anggaran kasnya; 4. Bendahara dan pengelola gaji telah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKA D.I. Yogyakarta untuk namun verifikasi dan pembantu bendahara belum mendapatkan	1	4	4	Memberikan pelatihan internal tentang penatausahaan keuangan kepada semua personil di Kelompok Substansi Keuangan, khususnya yang bertugas sebagai verifikasi dan Pembantu Bendahara
		8 Pengambilan uang secara tidak sah	1. Pemalsuan spesimen tanda tangan pada cek 2. Sengaja mengubah nomor rekening tujuan transfer ke rekening pribadi.	1. Kasub Bag Keuangan; 2. Kasubag Umum; 3. Bendahara Pengeluaran	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset )	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Buku kendali atas transaksi pengeluaran belum atas persetujuan Kasubkor Keuangan	Pengambilan uang dilakukan tanpa melibatkan orang lain (misal bendahara)	Kerugian negara/daerah	1. Penggunaan cek atas nama bukan atas cek unjukan; 2. Penggunaan Pre-number cek; 3. Terdapat buku kendali dalam bentuk excel untuk mencatat setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi yang ditandatangani namun tanpa persetujuan Kasubkor Keuangan; 4. Telah dilakukan verifikasi pada saat pengajuan SPJ antara nomor rekening tujuan dengan nomor yang tercantum dalam tagihan; 5. Telah dilakukan rekonsiliasi bank secara periodik oleh bendahara setiap bulan.	1	4	4	Menginstruksikan Kasubkor Keuangan untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.



No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan			
										Pengendalian Existing				Skor likelihood 12	Skor Dampak 13	Skor Dampak 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15			
		9 Pembayaran gaji/TPP kepada pegawai yang lebih besar dari yang seharusnya	1. Tidak melakukan pemotongan terhadap gaji/TPP yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (misalnya naik jabatan, status anak kuliah karena tidak ada update data, pensiun, mutasi) 2. Manipulasi daftar hadir manual dan atau data rekap kehadiran pegawai sebagai dasar penghitungan gaji/TPP	1. Kasub Bag Keuangan; 2. Kasub Bag Umum 3. Bendahara Pengeluaran	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset)	Kepala Dinas PUPESDM DIY	Belum dilakukan verifikasi terhadap rekapitulasi daftar hadir melalui e-PRIMA dengan daftar hadir manual	Pegawai jarang berada di kantor dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Kerugian keuangan negara/daerah	Adanya pemisahan tugas antara pembuat daftar gaji/TPP, yaitu oleh pengelola/pengadministrasi gaji dengan petugas pengadministrasi kepegawaian yang melakukan pembaharuan data dasar pembayaran gaji/TPP; 3. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi antara jumlah pegawai dalam Daftar Gaji/TPP dengan jumlah pegawai aktif			1	4	4	1. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas perubahan data dasar pembayaran gaji/TPP dengan Bagian Kasda BPKA D.I. Yogyakarta yang didukung dengan SK terkait; 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-PRIMA sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP); 3. Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi daftar hadir melalui e-PRIMA dengan daftar hadir manual
D	Pengadaan Barang dan Jasa	10 Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan	Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.	PA, PPK, PPTK	Korupsi (benturan kepentingan/Conflict of Interest)	1. Bidang/Balai/ Subbagian pengusul 2. Pengurus Barang	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Jenis Barang yang diusulkan berulang, jumlahnya cukup banyak dan pengadaannya dilakukan pada penyedia barang tertentu saja.	Kerugian keuangan negara	1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			2	4	8	1. Memperkuat peran pengawasan internal melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset an
		11 Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark-up)	Anggaran PBJ dan atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tidak dilakukan secara keahlian antara lain dengan tidak melakukan survey harga pasar dan tanpa disertai data pendukung (backup) data harga yang jelas	Pengurus Barang Bidang/Balai/ Subbagian pengusul	Korupsi (benturan kepentingan/Conflict of Interest)	PA/KPA, PPK, PPTK	Lemahnya peran pengawasan internal dalam penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan (fraud) penganggaran PBJ.	Penyusunan anggaran atau HPS tidak dilakukan secara keahlian, dengan melakukan survei harga pasar.	Kerugian keuangan negara	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur: a) Pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b) HPS disusun secara keahlian.			2	5	10	1. Memperkuat peran pengawasan internal melalui reviu atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam proses penganggaran dan penyusunan HPS PBJ; 3. Melakukan reviu/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern
		12 Risiko pengadaan fiktif	a) Dilakukannya manipulasi/pemalsuan dokumen atas pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian, dan atau Surat Pesanan, antara lain: Berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang dan berita acara serah terima barang yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% namun sebenarnya pekerjaan tidak/belum dilaksanakan. b) Dilakukannya manipulasi/pemalsuan bukti pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan bukti pembelian/ pembayaran	Bendahara Pengeluaran, dan pengurus Barang.	Penyimpangan aset (Asset Misappropriation)/kecurangan pengeluaran (pengeluaran fiktif)	PPK/PPTK dan Pejabat Pengadaan	Lemahnya Pengawasan Internal dalam pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ	Tim pemeriksa dan penerima barang tidak memiliki kompetensi/ pengetahuan atas barang yang diadakan.	Kerugian keuangan negara	1. Terdapat Tim Pendukung/Tim Teknis PPK/PPTK dalam melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang; 2. Terdapat petugas gudang/penyimpan barang; 3. Barang yang diterima dan dikeluarkan/ digunakan telah diadministrasikan; 4. Terdapat kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar pembayaran, yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan kuitansi pembayaran			1	5	5	1. Memperkuat peran pengawasan internal melalui reviu atas pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam proses penerimaan dan pemeriksaan PBJ; 3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan PBJ secara komprehensif dan menetapkan rencana pengendaliannya

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor <i>likelihood</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13 PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	Calon rekanan memberikan gratifikasi/ suap dengan maksud agar dimenangkan atau ditunjuk pada proses PBJ, atau rekanan memberikan gratifikasi/ suap sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sering ditunjuk/dimenangkan dalam proses PBJ, dan berharap selalu ditunjuk sebagai rekanan mitra.	Rekanan	Korupsi (Gratifikasi)	- PA/KPA - PPK, PPTK - Pejabat Pengadaan	1. Lemahnya Pengawasan Internal dalam pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ; 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Terdapat kelemahan dan penyimpangan pada proses Pengadaan barang dan Jasa	Kerugian keuangan negara	1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 2. SK Gubernur Nomor 40/TV/2019 Tentang Pembentukan Komite Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Daerah DIY Tgl. 01 Februari 2019	2	5	10	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi, antara lain dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan serta pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas PUPESDM DIY
E	Sumber Daya Manusia (SDM)	14 Suap/ gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian	Terdapat suap/ gratifikasi dalam proses mempercepat/ memperlancar proses pengurusan berkas kepegawaian antara lain: Pembuatan gaji berkala, Kenaikan pangkat, Pengurusan pensiun pegawai, Penilaian SKP, Usulan Pengembangan dan Pembinaan SDM, Penilaian angka kredit	Pegawai terkait yang berkas kepegawaiannya dalam proses pengurusan	Korupsi (Suap/Gratifikasi)	Kasubag Umum	. Lemahnya peran pengawasan internal dalam pengelolaan data kepegawaian 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal		Menurunnya reputasi Dinas	Keputusan Kepala Dinas PUPESDM DIY Nomor 188/01591 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal di Lingkungan DPUPESDM DIY, yang mencakup: a) SOP tentang Pengelolaan Data Kepegawaian Nomor 065/02169 tanggal 20 Januari 2022 b). SOP tentang Penyiapan Bahan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Nomor 065/02170 tanggal 20 Januari 2022 c). SOP tentang Penyiapan Bahan dan Pemberhentian Pegawai Nomor 065/02171 tanggal 20 Januari 2022 d). SOP tentang Penyiapan Bahan Usulan Pengurusan Taspen Penilaian SKP, Usulan Pengembangan dan Pembinaan SDM e). SOP tentang Penyiapan Daftar Penilaian Kinerja pegawai Nomor 065/02175 tanggal 20 Januari 2022 f). SOP tentang Penilaian SKP, Usulan Pengembangan dan Pembinaan SDM Nomor 065/02176 tanggal 20 Januari 2022 g). SOP tentang Penyiapan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Nomor 065/02179 tanggal 20 Januari 2022	2	4	8	1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; 2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;
F	Aset dan Persediaan	15 Perencanaan pengadaan Aset dan Persediaan tidak sesuai kebutuhan	Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan.	Pengurus Barang ;	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset )	Bidang/Balai/Sub bagian pengusul	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan aset 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Jenis Barang yang diusulkan berulang, jumlahnya cukup banyak dan pengadaannya dilakukan pada penyedia barang tertentu saja.	1. Menurunnya kinerja OPD 2. Kerugian keuangan negara	1. Menyampaikan informasi akan kebutuhan barang untuk diusulkan kepada masing-masing bidang/balai/sub bagian; 2. Memeriksa kondisi fisik barang atau inventaris yang layak diganti atau diperbaiki oleh masing-masing bidang/balai dan sub bagian serta rencana kebutuhan barang tahun mendatang dalam rangka tuntutan kerja; 3. Membuat rekapitulasi atas usulan masing-masing bidang/balai/sub bagian	2	4	8	1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui kegiatan reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ secara intern; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Membentuk tim pencegahan kecurangan perencanaan pengadaan aset dan persediaan
		16 Penggunaan aset dan persediaan OPD secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat OPD	a) Penggunaan Bahan Habis Pakai (ATK, bensin) untuk kepentingan pribadi. b) Aset digunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya operasionalnya dibebankan kepada OPD.	Kasubag Umum	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset )	Pengurus Barang, Pejabat/Pegawai OPD yang memperoleh pinjaman aset	Tidak terdapat mekanisme yang memuat larangan aset digunakan untuk kepentingan pribadi beserta sanksinya	Tidak ada pertanggungjawaban penggunaan Bahan Habis Pakai oleh masing-masing personil (penggunaan bon bensin) dan Bidang/Balai/Subbagian	1. Kerugian negara 2. Menurunnya kinerja pengawasan	Terdapat surat penunjukan pemegang barang yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aset	3	4	12	Adanya jaminan yang mengikat dan larangan aset digunakan untuk kepentingan pribadi beserta sanksinya

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				Skor likelihood 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			15	
		17 Penyalahgunaan/ penggelapan aset OPD	a) Penyalahgunaan/ penggelapan aset dengan cara tidak dikembalikannya aset/barang inventaris yang dipinjamkan kepada pejabat/ pegawai. b) Penjualan/penguasaan aset DPUPESDM DIY oleh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. c) Penghapusan aset DPUPESDM DIY yang tidak sesuai ketentuan untuk menghilangkan jejak aset yang dicuri/hilang.	Kasubag Umum	Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset )	Pengurus Barang, Pejabat/Pegawai OPD yang memperoleh pinjaman aset		Tidak terdapat SOP pengembalian barang inventaris yang dipinjam	1. Kerugian negara 2. Menurunnya kinerja pengawasan	1) Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaan pengguna anggaran; 2) Menyampaikan informasi dan pengecekan langsung kepada semua bidang dan subbagian untuk membuat daftar barang yang rusak berat; 3) Mengkompilasi daftar BMD yang akan dihapus terutama yang sudah tidak digunakan lagi; 4) Mengklarifikasi dan menilai daftar BMD tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala melalui Kasubag atas usulan penghapusan; 5) Memberikan penilaian atas usulan penghapusan barang. Jika usulan BMD benar adanya akan disetujui dan diberi tandatangan. Jika tidak akan ditunda dan disimpan kembali. 6) Mengirimkan usulan penghapusan BMD yang telah disetujui yang memiliki Tusi Pengelolaan Aset selaku pembantu pengelola BMD. 7) Mendampingi tim penghapusan BMD dan menerima surat penetapan penghapusan. 8). Menyampaikan surat penetapan penghapusan BMD kepada Inspektur untuk diketahui. 9) Melakukan perubahan KIR, KIB dan buku inventaris barang atas implikasi penghapusan barang. 10) Menyimpan surat penetapan penghapusan sebagai arsip.	3	5	15	* Menguatkan peran pengawasan internal * Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan fraud kepada pegawai * Melakukan proses verifikasi secara cermat dan teliti atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilengkapi dengan laporan/notulen
G	Teknologi Informasi	18 Penyalahgunaan data SIM Dinas PUPESDM DIY, yaitu SIM (Agenda, Disposisi, Aset), Klinik Konstruksi, Kang Jogja, SIPKON (Pengendalian Kontrak Konstruksi), SISDA (Sumber Daya Air), SILAPOP (Operasi dan Pemeliharaan Irigasi), AKNPI (ANGKA Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi), Go Hidro (Realtime Pos Duga Air, Hidrologi), SIH3 (Hidrometeorologi, Hidrologi, dan Hidrogeologi), SIPSUPER (PSU Permukiman), NDALEM (RTLH), SI Air Tanah, SIPGELIS (Ketenagalistrikan), SIPBANG	1. Akses ke sistem dan data secara tidak sah 2. Penggunaan data informasi pada Sistem Informasi / aplikasi tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang 3. Transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem adalah transaksi tidak sah, tidak akurat, dan tidak lengkap. 4. Penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen, yaitu: Manajemen menggunakan fasilitas melebihi yang ditetapkan di unit kerja.	1. Sekretaris, Kasubag Umum, Perencana Muda beserta staf/operator  2. Kabalai PJK 3. Kabid SDAD 4. Kabid Perumahan 5. Kabid ESDM serta Kabalai P3ESDM	Penyalahgunaan TI	1. Sekretaris, Kasubag Umum, Perencana Muda beserta staf/operator  2. Kabalai PJK 3. Kabid SDAD 4. Kabid Perumahan 5. Kabid ESDM serta Kabalai P3ESDM	SOP sistem informasi belum memuat mekanisme pemberian dan pengendalian password, pengamanan pemberian akses ke pegawai, dan sanksi bagi para pelanggar		1. Reputasi organisasi menurun jika terbukti terjadi penyalahgunaan informasi data pemeriksaan 2. Terdapat data yang seharusnya tidak dipublikasikan (dikecualikan) di tampilan di website/aplikasi 3. Data bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab (disalahgunakan) dan data tidak dapat dipulihkan kembali sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun masyarakat.	1. Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemda DIY 2. Terdapat fitur captcha untuk meningkatkan keamanan dan user activity log (riwayat aktivitas pengguna) untuk mengetahui riwayat akun yang melakukan log in ke dalam aplikasi; 3. Pembatasan hak akses/otorisasi bagi auditor aplikasi Sistem Informasi 4. Terdapat backup arsip data secara rutin 5. Terdapat kerja sama dengan Dinas Kominfo D.I. Yogyakarta terkait Rekomendasi SPBE melalui sistem aplikasi Peladen.	2	3	6	1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo D.I. Yogyakarta; 2. Menyempurnakan SOP sistem informasi dengan memuat pengelolaan termasuk mekanisme pemberian dan pengendalian password, pengamanan pemberian akses ke pegawai, dan sanksi bagi para pelanggar
H	Sistem Komunikasi dan Pelaporan	19 Kecurangan (Fraud) dalam penyusunan laporan keuangan.	Rekayasa laporan keuangan dengan melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, agar dapat menyajikan lebih tinggi (overstated) atau lebih rendah (understated) belanja/ pengeluaran, pendapatan, aset, dan kewajiban untuk tujuan tertentu.	Sekretaris	Kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan (Fraudulent Statement)	Kepala Subbagian Keuangan	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam penyusunan laporan keuangan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Urusan Keuangan hanya ditangani seorang pegawai/ pegawai tertentu saja dan tidak dilakukan rotasi secara berkala.	Reputasi organisasi menurun jika terbukti terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke BPKA Kurangnya keakuratan data Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. Koordinasi internal 2. Penggunaan Aplikasi	2	5	10	1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi; 2. Melakukan review/pengawasan intern atas laporan keuangan yang disusun oleh subbag keuangan; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait penyusunan laporan keuangan

No	Aspek/Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat Ini (Current Risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Skor likelihood 12	Skor Dampak 13	Skor Dampak 14	15
		20 Manipulasi data laporan kinerja	Rekayasa laporan keuangan dengan melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan capaian kinerja atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan kinerja, agar dapat menyajikan lebih tinggi (overstated) atau lebih rendah (understated) data capaian kinerja untuk tujuan tertentu.	Sekretaris, perencana program anggaran dan pelaporan	Kecurangan dalam penyusunan laporan inerja (Fraudulent Statement)	Sekretaris	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam penyusunan laporan kinerja 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	perhitungan capaian tidak sesuai dengan realisasi fisik dilapangan	data perencanaan untuk tahun selanjutnya tidak valid Kerugian negara karena adanya pergeseran yang menyebabkan pemborosan atau kegiatan prioritas lain tidak tercapai	1. Verifikasi RKA oleh TAPD 2. Reviu RKA SKPD oleh Inspektorat Daerah 3. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD oleh TAPD 4. Penggunaan aplikasi SIPD dalam penganggaran	1	4	4	1. Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi terintegrasi untuk pengendalian, administrasi dalam perencanaan dan penganggaran APBD yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan dan sosialisasi e-budgeting kepada setiap level user; 2. BKAD mengirimkan atensi kepada Inspektorat terhadap program-program dengan risiko tinggi yang diusulkan oleh PD. 3. Meningkatkan reviu penyusunan RKA SKPD oleh Inspektorat dengan penekanan pada reviu rincian belanja

Yogyakarta, 29 Januari 2024  
KEPALA,



**MATRIKS RISIKO FINAL SPBE**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY**  
**TAHUN 2024**

Formulir 2.1 Informasi Umum		Formulir 2.3 Struktur		Tabel 3.1 Identifikasi		Formulir 3.0-1 Identifikasi Risiko SPBE		Formulir 3.0-2 Analisa Risiko SPBE				Formulir 3.0-3 Evaluasi Risiko			Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko			Uraian Halaman 30 KEMEN PAN & RB no 5 tahun 2020											
Informasi Umum Terkait KMR/UKR/UPR SPBE		Struktur Pelaksana Manajemen Risiko		Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Sistem/ Penilaian/ Hasil Audit	Sub Sistem/Sub Penilaian/ Sub Hasil	Identifikasi Risiko SPBE				Analisa Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE			Rencana Penanganan Risiko			Risiko residual	Pemantauan Risiko					
Nama UPR SPBE	Dinas PUPESDM DIY	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak	Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Prioritas Penanganan Risiko SPBE	Opasi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
									Negatif					Level	Penjelasan	Level	Penjelasan	Risiko SPBE	Risiko SPBE	Risiko SPBE	Risiko SPBE	Risiko SPBE	Risiko SPBE						
									Kesalahan Pengisian konten website resmi SKPD (Konten yang di upload tidak seharusnya dipublikasikan pada website)	Belum ada prosedur baku terkait pengisian konten website resmi SKPD	Keamanan SPBE	Terdapat data yang tidak dipublikasikan di tampilan di website	Reputasi	Admin website hanya pada personel tertentu dan memohon persetujuan kepada sekretaris sebelum upload konten pada website namun belum ada SOP yang memadai	2	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $5% < X \leq 10%$	1	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) $\leq 10$	2	Sangat Rendah	Tidak	4	Mitigasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SK petugas pengembangan data dan informasi website SKPD, Standar Pelayanan Informasi dan pengaduan	SOP dan SK	semester 2 Tahun 2024	Sekretaris Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja	Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris Dinas						Data yang di ada pada website resmi SKPD tidak Update	Belum ada rencana terjadwal terkait updating data pada website	Data dari Informasi	Adanya informasi yang sudah tidak terakal namun belum diperbarui	Reputasi dan kinerja	validasi keakuratan data informasi	2	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $5% < X \leq 10%$	4	Pemberitaan negatif di media massa lokal dan media sosial yang sesuai fakta dan Penurunan Kinerja 60% s.d 80%	13	Sedang	Tidak	3	Mitigasi	Melaksanakan pengelolaan layanan informasi, pengumpulan kebutuhan serta validasi data untuk menjamin keakuratan data informasi (validasi pendukung satu data pembangunan daerah)	Laporan	semester 4 Tahun 2024	Sekretaris Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
Fungsi UPR SPBE	a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Sub Bagian Umum						Data base Sistem Informasi Website DPUPESDM dimungkinkan hilang dan bocor serta disusupi link website ilegal (judi online, penipuan, dll)	adanya pihak yang mengeskripal atau menyusupi data (hacker)	Keamanan SPBE	Data Hasil Pemeriksaan bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab dan data tidak dapat dipulihkan kembali sehingga menyulitkan dalam menyajikan pelaporan secara tepat waktu	Reputasi dan kinerja	1. Maintenance aplikasi (server dan database) dan pengamanan password secara berkala 2. Menghapus file laman penyusup, kemudian menghapus file file yang tidak diperlukan untuk berjalannya website, kemudian melakukan sanitasi input serta pembatasan file upload 3. Mengganti sistem secara keseluruhan jika sistem yang sekarang dipakai sudah lama tidak dilakukan update dan pemeliharaan.	3	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $10% < X \leq 20%$	4	Pemberitaan negatif di media massa lokal dan media sosial yang sesuai fakta dan Penurunan Kinerja 60% s.d 80%	17	Tinggi	Ya	1	Mitigasi	1. Melaksanakan maintenance dan backup data pada sistem informasi/ website untuk meminimalisir terjadinya hacker atau peretasan 2. Melakukan Koordinasi dan Penanganan bersama Dinas Kominfo DIY apabila terjadi serangan hacker	Maintenance Sistem	semester 2 Tahun 2024	Kepala Sub Bagian Umum	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
	c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi								Sistem Informasi belum sesuai dengan rekomendasi Dinas Kominfo DIY	Kesalahan input data sumber (sourcecode) oleh petugas penginput	Rencana dan Anggaran, Keamanan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan	adanya salah saji output laporan Sistem Informasi	Reputasi serta Hukum dan Regulasi	Mentipkan Hosting dan Domain ke Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	3	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $10% < X \leq 20%$	2	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) $10 \leq 20$ dan Presentase implementasi Kepatuhan/Kese suaian Dokumen yang dimiliki Terhadap Regulasi SPBE 80% - 90%	10	Rendah	Tidak	2	Mitigasi	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kominfo DIY terkait rekomendasi investasi TIK meliputi pembuatan/pengembangan sistem informasi serta pengadaan perangkat keras TIK	Rekomendasi	semester 1 Tahun 2024	Kepala Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2024																												

Yogyakarta, 29 Januari 2024  
 KEPALA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY



ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.  
 NIP. 197108241998032002

**MATRIKS RISIKO FINAL SPBE**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY**  
**TAHUN 2024**

Formulir 2.1 Informasi Umum		Formulir 2.3 Struktur		Tabel 3.1 Identifikasi				Formulir 3.0-1 Identifikasi Risiko SPBE				Formulir 3.0-2 Analisa Risiko SPBE				Formulir 3.0-3 Evaluasi Risiko				Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko				Lihat Halaman 30 Kementrian PAN & RB no 5 tahun 2020						
Informasi Umum Terkait KMR/UKR/UPR SPBE		Struktur Pelaksana Manajemen Risiko		Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Sistem/ Penilaian/ Hasil Audit	Sub Sistem/Sub Penilaian/ Sub Hasil	Identifikasi Risiko SPBE					Analisis Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE		Rencana Penanganan Risiko				Risiko residual	Pemantauan Risiko					
									Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area	Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE	Keputusan Penanganan Risiko SPBE	Prioritas Penanganan Risiko SPBE			Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
Identifikasi Risiko SPBE																														
Nama UPR SPBE	Dinas PUPESDM DIY	Pemilik Resiko SPBE	Kepala Dinas	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Negatif	Kesalahan Pengisian konten website resmi SKPD (Konten yang di upload tidak seharusnya dipublikasikan pada website)	Belum ada prosedur baku terkait pengisian konten website resmi SKPD	Keamanan SPBE	Terdapat data yang tidak dipublikasikan di tampilan di website	Reputasi	Admin website hanya pada personel tertentu dan memohon persetujuan kepada sekretaris sebelum upload konten pada website namun belum ada SOP yang memadai	2	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $5% < X \leq 10%$	1	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) $\leq 10$	2	Sangat Rendah	Tidak	4	Mitigasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SK petugas pengembangan data dan informasi website SKPD, Standar Pelayanan Informasi dan pengaduan	SOP dan SK	semester 2 Tahun 2024	Sekretaris Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja	Koordinator Resiko SPBE	Sekretaris Dinas						Data yang di ada pada website resmi SKPD tidak Update	Belum ada rencana terjadwal terkait updating data pada webiste	Data dan Informasi	Adanya informasi yang sudah tidak terpakai namun belum diperbarui	Reputasi dan kinerja	validasi keakuratan data informasi	2	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $5% < X \leq 10%$	4	Pemberitaan negatif di media massa lokal dan media sosial yang sesuai fakta dan Penurunan Kinerja 60% s.d 80%	13	Sedang	Tidak	3	Mitigasi	Melaksanakan pengelolaan layanan informasi, pengumpulan kebutuhan serta validasi data untuk menjamin keakuratan data informasi (validasi pendukung satu data pembangunan daerah)	Laporan	semester 4 Tahun 2024	Sekretaris Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
	Fungsi UPR SPBE	a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan	Pengelola Resiko SPBE	Kepala Sub Bagian Umum						Data base Sistem informasi Website DPUPESDM dimungkinkan hilang dan bocor serta disusupi link website ilegal (judi online, penipuan, dll)	adanya pihak yang mengenskripsi atau mensusupi data (hacker)	Keamanan SPBE	Data Hasil Pemeriksaan bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab dan data tidak dapat dipulihkan kembali sehingga menyulitkan dalam menyajikan pelaporan secara tepat waktu	Reputasi dan kinerja	1. Maintenance aplikasi (server dan database) dan pengamanan password secara berkala 2. Menghapus file laman penyusup, kemudian menghapus file file yang tidak diperlukan untuk berjalannya website, kemudian melakukan sanitasi input serta pembatasan file upload 3. Mengganti sistem secara keseluruhan jika sistem yang sekarang dipakai sudah lama tidak dilakukan update dan pemeliharaan.	3	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $10% < X \leq 20%$	4	Pemberitaan negatif di media massa lokal dan media sosial yang sesuai fakta dan Penurunan Kinerja 60% s.d 80%	17	Tinggi	Ya	1	Mitigasi	1. Melaksanakan maintenance dan backup data pada sistem informasi/ website untuk meminimalisir terjadinya hacker atau peretasan 2. Melakukan Koordinasi dan Penanganan bersama Dinas Kominfo DIY apabila terjadi serangan hacker	Maintenance Sistem	semester 2 Tahun 2024	Kepala Sub Bagian Umum	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan
	c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi								Sistem Informasi belum sesuai dengan rekomendasi Dinas Kominfo DIY	Kesalahan input data sumber (sourcecode) oleh petugas penginput	Rencana dan Anggaran, Keamanan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan	adanya salah saji output laporan Sistem Informasi	Reputasi serta Hukum dan Regulasi	Menitipkan Hosting dan Domain ke Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	3	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun $10% < X \leq 20%$	2	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) 10 s.d 20 dan Persentase Implementasi Kepatuhan/Kese suaian Dokumen yang dimiliki Terhadap Regulasi SPBE 80% - 90%	10	Rendah	Tidak	2	Mitigasi	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kominfo DIY terkait rekomendasi investasi TIK meliputi pembuatan/pengembangan sistem informasi serta pengadaan perangkat keras TIK	Rekomendasi	semester 1 Tahun 2024	Kepala Dinas	Tidak Ada	Pemantauan Triwulanan	
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2024																													

Yogyakarta, 29 Januari 2024  
KEPALA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY  
  
ANNA RINA HERBRANTI, S.T.,M.T.  
NIP. 197106241998032002